LAPORAN PRAKTIK LABORATORIUM

PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

PEMBIMBING:

Dra. Helly Ocktilia, MP

OLEH:

STEFANIA NINDYATI VERONIKA

NRP. 2003001

PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul	:	LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
Nama Mahasiswa	:	Stefania Nindiyati Veronika
NRP	:	2003001
Program	:	Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan

Pembimbing:

Dra. Helly Ocktilia, MP.

Mengetahui:
Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
Program sarjanaterapan
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Lina Favourita Setiaputri, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya praktikan dapat menyelesaikan laporan Praktikum Laboratorium Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan Praktikum Laboratorium yang dilaksanakan secara luring.

Dalam proses penyusunan laporan, praktikan telah diberikan dukungan dan bimbingan oleh berbagi pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini praktikan menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Marjuki, M.Sc selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
2. Lina Favourita, Ph.D selaku Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang sudah memberikan arahan dan masukan demi kelancaran kegiatan praktikum.
3. Dra. Atirista Nainggolan, M.P. selaku Kepala Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang telah memberikan arahan kepada praktikan dalam proses pelaksaaan praktikum laboratorium.
4. Dra. Helly Ocktilia, M.P. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada prakikan selama pelaksanaan praktikum laboratorium dan penyusunan laporan.
5. Rekan-rekan anggota kelompok 3 yang senantiasa memberikan motivasi selama praktikum laboratorium.
6. Pemerintah Kelurahan Babakan Surabaya dan masyarakat Kelurahan Babakan Surabaya yang telah menerima kehadiran dan memberikan ilmu dan pengalaman bagi praktikan selama pelaksanaan praktikum laboratorium.
7. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama perlaksanaan praktikum laboratorium

Praktikan mengharapkan dengan adanya laporan ini memberikan manfaat bagi pembaca. Praktikan menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu praktikan mengharapkan kritik dan saran dari semu pihak dan semoga laporan ini berguna bagi praktikan dan bagi pihak pembaca.

Bandung, April 2023

Praktikan

DAFTAR ISI

Halama Judul ……x

Lembar Pengesahan ……i

Kata Pengantar ……ii

Daftar Isi …….. iii

Bab I Pendahuluan ……1

A. Latar Belakang ……1

B. Tujuan Praktikum ……1-2

C. Manfaat Praktikum…….2-3

D. Waktu dan Lokasi Praktikum …….3-4

E. Proses Praktikum ……...4-13

F. Sistematika Laporan …….13-14

Bab II Praktikum Laboratorium ……..15

A. Profil Analis Jaminan Sosial …….15-31

B. Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial …….31-44

C. Profil Pemberdayaan Sosial …….44-63

D. Profil Analis Penataan Lingkungan Sosial …… 63-82

E. Profil Analis Penanggulangan Bencana …….82-98

Bab III Kesimpulan dan Rekomendasi ……100

A. Kesimpulan …….100-102

B. Rekomendasi ……102

Daftar Pustaka …….103-105

Lampiran …….106-107

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pendidikan di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran dalam kelas *(classroom teaching),* tetapi juga melalui praktikum laboratorium *(laboratory practicum) indoor* dan *outdoor*. Kegiatan praktikum menjadi wahana bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan-keterampilan dasar dan keterampilan-keterampilan khusus dalam proses intervensi pekerjaan sosial. Dengan demikian mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam praktik aras mikro, meso, dan makro, baik dalam bekerja dengan individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi sosial. Praktikum Laboratorium disamping dilaksanakan dalam ruangan laboratorium, juga mahasiswa diberikan kesempatan melakukan aktivitas di masyarakat dan/atau organisasi sosial untuk memahami fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.

Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial menjadi bagian penting dalam membentuk profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Melalui praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan keterampilan praktik intervensi pekerjaan sosial mulai proses awal hingga pengakhiran melalui aktivitas di dalam laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Demikian pula dalam praktikum ini dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan keterampilan dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial. Kegiatan praktikum laboratorium berfokus pada penguasaan keterampilan dasar dan keterampilan proses intervensi pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat dan organisasi sosial.

1.2 Tujuan dan manfaat Praktikum

1.2.1 Tujuan Praktikum

Praktikum laboratorium bertujuan agar mahasiswa memiliki :

1. Sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, perbedaan agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinil orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
3. Kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
4. Kemampuan untuk mempraktikan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
5. Memiliki keterampilan dalam melakukan proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan :
    a. Pendekatan Awal
    b. Asesmen
    c. Perencanaan Intervensi

1.2.2 Manfaat Praktikum

a. Bagi Mahasiswa :

1) Terbentuknya sikap mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasar agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinil orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
2) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
3) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
4) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mempraktikan keterampilanketerampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
5) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
6) Mahasiswa memiliki keterampilan praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial yang meliputi tahapan :
    a. Pendekatan awal
    b. Asesmen
    c. Rencana Intervensi

b. Bagi Lembaga

1) Meningkatnya kualitas kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
2) Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

1.3 Waktu dan Lokasi Praktikum

Lokasi Praktikum yakni di Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Bandung Jawa Barat.

Waktu pelaksanaan Praktikum Laboratorium sesuai dengan tahapan proses terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu :

1. Pra Lapangan
   a. Pembekalan : 25 Januari - 03 Februari 2023
   b. Pelepasan Praktikan : 03 Februari 2023
2. Lapangan (Indoor) : 06 Februari - 15 April 2023
   a. Praktik Analis Jaminan Sosial :
   b. Praktik Analis Sumber Dana Bantuan Sosial :
   c. Praktik Analis Pemberdayaan Sosial :
   d. Praktik Analis Penataan Lingkungan Sosial :
   e. Praktik Analis Penangulangan Bencana :
3. Pasca Lapangan
   a. Bimbingan penulisan laporan : 16 - 26 April 2023
   b. Pendaftaran ujian : 27 - 29 April 2023
   c. Ujian Lisan Praktikum : 01 - 02 Mei 2023
   d. Perbaikan dan penyerahan Laporan : 03 - 10 Mei 2023

1.4 Proses Praktikum

Pelaksanan praktikum dilakukan secara kelompok. Penentuan kelompok dilakukan oleh Prodi Lindayasos melalui Laboratorium Lindayasos, dengan jumlah anggota kelompok berkisar antara 7-8 orang per kelompok, yang akan dibimbing oleh 1 (satu) orang dosen pembimbing praktikum. Praktikum Laboratorium dilaksanakan selama tiga bulan selama 6 jam per hari, dilaksanakan setiap hari Rabu sampai dengan hari Sabtu pada setiap minggunya, selama satu semester (17 minggu), dengan bobot 6 SKS.

Proses praktikum laboratorium dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran.

Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap pra lapangan yang dilaksanakan untuk menyiapkan praktikan dan dosen pembimbing praktikum dalam memahami kegiatan praktikum laboratorium. Tahap pra lapangan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pembekalan Umum

Pembekalan umum dilaksanakan dengan pemberian materi tentang perlindungan dan jaminan sosial oleh nara sumber yang terdiri dari

a) Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI

b) Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI

2. Bimbingan pra lapangan oleh dosen pembimbing praktikum:

a) Review tentang materi pembekalan umum dan penugasan melalui *Google Classroom*

b) Bimbingan teori/konsep dan keterampilan yang akan diterapkan

c) Melakukan Praktik, demontrasi, *role playing* tentang kegiatan dan teknologi Perlindungan dan pemberdayaan sosial dengan menggunakan data sekunder, dalam hal :

i Mengenal populasi kelompok sasaran (*population target group*) dan lingkungan sosialnya.

ii Mengidentifikasi dan memahami program-program : Sistem Jaminan Sosial, Sumber Dana Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penataan Lingkungan Sosial, Penanggulangan Bencana

iii Mempelajari isu-isu masalah perlindungan dan pemberdayaan sosial yang terkait dengan 5 (lima) profil Prodi Lindayasos.

iv Mengidentifikasi kebijakan dan program/kegiatan penanganan masalah Perlidungan dan Pemberdayaan sosial sesuai dengan 5 (lima) profil Prodi Lindayasos.

d) Membuat matriks rencana kerja dan desain teknologi yang sesuai dengan kegiatan praktikum laboratorium.

3. Serah terima praktikan dari Prodi kepada Dosen Pembimbing Praktikum

Serah terima praktikan, dilaksanakan secara daring dengan menggunakan media *zoom meeting* dilakukan oleh Kaprodi Lindayasos kepada Dosen Poltekesos Bandung yang ditunjuk sebagai dosen pembimbing praktikum.

Tahap Lapangan

Tahap lapangan dilaksanakan dalam lima sesi sesuai profil lulusan Prodi Lindayasos yaitu praktik sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana Setiap sesi dilaksanakan selama 14 hari kalender, dengan rician kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial

a). Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh praktisi/pakar Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola pelaksanaan sistem jaminan sosial, yang meliputi:

i Berbagai isu dalam implementasi jaminan sosial

ii Model jaminan sosial yang digunakan

iii Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan jaminan sosial

iv Merancang program jaminan sosial
v Melakukan analisis kelayakan rancangan program jaminan sosial
vi Stakeholder terkait program jaminan sosial.

b). Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Jaminan Sosial, sebagai berikut:

1) Pengetahuan:
   1) Mengetahui konsep teoritis kebutuhan dasar manuaia
   2) Memahami konsep masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial
   3) Mengetahui konsep perlindungan dan jaminan sosial
   4) Mengetahui konsep standar praktik pekerjaan sosial
2) Keterampilan
   1) Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
   2) Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan dan jaminan sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
   3) Mampu menganalisis dan menyusun program bantuan sosial.
   4) Mampu menganalisis dan menyusun program advokasi sosial Mampu menganalisis dan menyusun program pemberian akses bantuan hukum.

c). Praktik Analis Jaminan Sosial, meliputi :

1) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial
2) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder
3) Menyusun Rencana Intervensi sesuai dengan kasus/permasalahan yang dipilih oleh praktikan
4) Menyusun laporan praktik analis jaminan sosial

2. Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

a). Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh praktisi/industri Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola sumber dana bantuan sosial, yang meliputi:

i. Berbagai isu dalam implementasi sumber dana bantuan sosial,
ii. Model sumber dana bantuan sosial,yang digunakan
iii. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial,
iv. Merancang program sumber dana bantuan sosial,

v. Melakukan analisis kelayakan rancangan program sumber dana bantuan sosial,
vi. Stakeholder terkait program sumber dana bantuan sosial,

b). Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, sebagai berikut:

1). Pengetahuan
1) Menguasai konsep bantuan sosial dan jenisnya
2) Menguasai konsep sumber dana bantuan sosial
3) Menguasai konsep penggalangan dana dan prinsip-prinsip penggalangan sumber dana bantuan sosial
4) Menguasai konsep perencanaan dalam penggalangan sumber dana bantuan sosial
5) Menguasai konsep pelaksanaan dan kebijakan penggalangan sumber dana bantuan sosial
6) Menguasai konsep monitoring dan evaluasi dalam penggalangan sumber dana bantuan sosial

2). Keterampilan
1) Mampu menganalisis dan menyusun program perencanaan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
2) Mampu dalam menganalisis dan menyusun program pelaksanaan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial.
3) Mampu menganalisis dan menyusun program monitoring dan evaluasi dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
4) Mampu menganalisis dan menyusun sistem pelaporan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
5) Mampu menganalisis dan menyusun sistem informasi dan komunikasi dalam penggalangan dana pengelolaan dana bantuan sosial

c). Praktik Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, meliputi :
1) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ masalah-masalah dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial
2) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder
3) Menyusun Rencana Intervensi
4) Menyusun laporan praktik analis sumber dana bantuan sosial

3. Peningkatan Kompetensi Analis Pemberdayaan Sosial

a). Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola Pemberdayaan Sosial, yang meliputi:
i. Berbagai isu dalam implementasi pemberdayaan sosial,
ii. Model pemberdayaan sosial,yang digunakan
iii. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam Pemberdayaan Sosial,

iv. Merancang program Pemberdayaan Sosial,
v. Melakukan analisis kelayakan rancangan program Pemberdayaan Sosial
vi. Stakeholder terkait program Pemberdayaan Sosial

b). Peningkatan Kompetensi Analis Pemberdayaan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Pemberdayaan Sosial, sebagai berikut:

1). Pengetahuan

1) Menguasai Konsep kebutuhan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam pemberdayaan sosial
2) Menguasai Konsep dan teknologi pemberdayaan sosial
3) Menguasai Konsep sumber daya penyelenggaraan sosial dalam pemberdayaan sosial
4) Menguasai Konsep supervisi dalam program pemberdayaan sosial
5) Menguasai Konsep pendampingan sosial dan penguatan kelembagaan sosial dalam pemberdayaan sosial
6) Menguasai Konsep keserasian sosial dan pemasaran hasil usaha dalam pemberdayaan sosial

2). Keterampilan

1) Mampu mengidentifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan dalam pemberdayaan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
2) Mampu menganalisis dan menyusun program penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi dalam pemberdayaan sosial
3) Mampu menganalisis dan menyusun program pemberian keterampilan dalam pemberdayaan sosial
4) Mampu menganalisis dan menyusun program penguatan kelembagaan dalam masyarakat dalam pemberdayaan sosial
5) Mampu melaksanakan program pendampingan sosial untuk pemberdayaan sosial
6) Mampu menganalisis dan menyusun program kemitraan dan penggalangan dana untuk pemberdayaan sosial
7) Mampu melaksanakan pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha
8) Mampu melaksanakan peningkatan akses pemasaran hasil usaha
9) Mampu melaksanakan supervisi dan advokasi sosial dalam pemberdayaan sosial
10) Mampu menganalisis dan menyusun program keserasian sosial dan bimbingan lanjut dalam pemberdayaan sosial

c). Praktik Analis Pemberdayaan Sosial, meliputi :

1) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ masalah-masalah dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial
2) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder

3) Menyusun Rencana Intervensi
4) Menyusun laporan praktik analis pemberdayaan sosial

4. Peningkatan Kompetensi Analis Penataan Lingkungan Sosial

a). Peningkatan Kompetensi Analis Penataan Lingkungan Sosial oleh praktisi/industri Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola Penataan Lingkungan Sosial, yang meliputi:

i. Berbagai isu dalam mengelola penataan lingkungan sosial
ii. Model penataan lingkungan sosial yang digunakan
iii. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam penataan lingkungan sosial Merancang program penataan lingkungan sosial
iv. Melakukan analis kelayakan rancangan program penataan lingkungan sosial
v. Stakeholder terkait program Penataan Lingkungan Sosial

b). Peningkatan Kompetensi Analis penataan lingkungan sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Penataan Lingkungan Sosial, sebagai berikut:

1). Pengetahuan
1) Menguasai Konsep ekologi manusia dalam lingkungan sosial
2) Menguasai Konsep krisis lingkungan, konflik sosial, dan urbanisasi
3) Menguasai Konsep degradasi lingkungan dan bencana alam
4) Menguasai Konsep adaptasi ekologi manusia
5) Menguasai Konsep interaksi sosial-ekologi dalam suatu sistem sosial komunitas dan ekosistem
6) Menguasai Konsep kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam
7) Menguasai Konsep praktik pekerjaan sosial dalam penataan lingkungan sosial

2). Keterampilan
1) Mampu menganalisis hubungan permasalahan lingkungan dengan munculnya masalah sosial
2) Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam
3) Mampu menganalisis dan menyusun program penataan lingkungan sosial dalam peningkatan keberfungsian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat

c). Praktik Analis Penataan Lingkungan Sosial, meliputi :
1) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ masalah-masalah dalam penataan lingkungan sosial
2) Assesmen dengan menggunakan data sekunder
3) Menyusun Rencana Intervensi
4) Menyusun laporan praktik Analis Penataan Lingkungan Sosial

5. Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana

a). Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana oleh praktisi/industri Membahas tentang pengalaman praktisi dalam penanggulangan bencana, yang meliputi:

i. Berbagai isu dalam penanggulangan bencana
ii. Model penanggulangan bencana yang digunakan
iii. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam penanggulangan bencana
iv. Merancang program penanggulangan bencana
v. Melakukan analisis kelayakan rancangan program penanggulangan bencana
vi. Stakeholder terkait program penanggulangan bencana

b). Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana oleh dosen yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi Profil Analis Penanggulangan Bencana, sebagai berikut:

1). Pengetahuan

1) Menguasai Konsep bencana alam dan non alam serta jenis-jenisnya
2) Menguasai Konsep masalah bencana dan sistem penanggulangan bencana
3) Menguasai Konsep mitigasi bencana, dan pengurangan risiko bencana.
4) Menguasai Konsep perlindungan korban bencana pada saat status darurat bencana
5) Menguasai Konsep standar minimum pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

2). Keterampilan

1) Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk pengurangan risiko bencana
2) Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan korban pada saat status darurat bencana
3) Mampu menganalisis pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan pengungsi
4) Mampu menganalisis dan menyusun program pemberdayaan korban bencana pasca bencana
5) Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan masyarakat resilien terhadap bencana

c). Praktik Analis Penanggulangan Bencana, meliputi :

1) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ masalah-masalah dalam penanggulangan bencana
2) Melakukan Assesmen, dengan menggunakan data sekunder
3) Menyusun Rencana Intervensi
4) Menyusun laporan praktik penanggulangan bencana

Tahap Pasca Lapangan

1. Finalisasi penyusunan laporan akhir praktikum
2. Ujian Lisan Praktikum
3. Perbaikan dan penyerahan laporan

1.5 Sistematika Laporan

Output dari kegiatan praktikum ini adalah berupa laporan akhir praktikum. Laporan praktikum dibuat dan diperiksa pada setiap tahap perkembangan praktikum yang mengacu pada kolom hasil-hasil yang diharapkan pada bagian tugas praktikan. Beberapa data yang perlu dilengkapi dalam laporan akhir antara lain :

1. Data mentah lapangan berupa naskah-naskah dokumen
2. Sumber pustaka
3. Peta
4. Foto
5. Video dan lain-lain

Pada akhir kegiatan mahasiswa wajib membuat laporan akhir yang mencantumkan keseluruhan hasil kegiatan praktikum. Laporan akhir kegiatan praktikum disusun secara individu berdasarkan sistematika penyusunan laporan sebagai berikut:

I. **BAB I PENDAHULUAN :** memuat latar belakang, tujuan dan manfaat praktikum, waktu dan lokasi praktikum, proses praktikum, dan sistematika laporan.

II. **BAB II PRAKTIKUM LABORATORIUM :** yang berisi tentang Profil Analis Jaminan Sosial, Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Profil Analis Pemberdayaan Sosial, Profil Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Profil Analis Penanggulangan Bencana. Masing-masing profil membahas mengenai gambaran umum masalah, tinjauan konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih, hasil asesmen, dan rencana intervensi.

III. **BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI :** memuat kesimpulan hasil praktikum dan rekomendasi yang ditujukkan kepada Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial serta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

BAB II
PRAKTIKUM LABORATORIUM

2.1 Profil Analis Jaminan Sosial

2.1.1 Gambaran Umum Masalah

Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2004, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sedangkan menurut Spicker (1995:58-60) jaminan sosial adalah suatu bentuk investasi sosial yang memberi untuk dalam jangka panjang yang berlandaskan dua pilar utama, yaitu redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial. Upaya pemerintah dalam menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat menghadapi kendala dan hambatan bagi seluruh masyarakat menghadapi kendala dan hambatan. Ada beberapa kasus dengan permasalahan yang sama yang ditemukan di Kecamatan Kiaracondong. Pada kasus yang pertama yaitu pasien yang tidak bisa menggunakan JKN-KIS ketika berobat di Puskesmas Kelurahan Babakan Surabaya. Meskipun adanya JKN-KIS yang tidak aktif, pasien tetap dilayani dengan baik dan tidak dipungut biaya. Anak pasien mengetahui ketidakaktifan KIS pasien ketika mengurus administrasi. Beliau mengatakan bahwa keluarganya baru menerima kartu kepesertaan JKN PBI dari pemerintah pada tahun lalu. Bahkan akhir tahun 2019, adiknya sempat memanfaatkan JKN-KIS PBI untuk berobat dan tidak ditemui masalah.

Faktor yang mengakibatkan berbagai kasus pelayanan jaminan kesehatan, yaitu dalam segi kepesertaan, pelayanan, dan pembiayaan. Setelah ditelusuri, ada faktor yang mengakibatkan kasus dalam pelayanan JKN KIS yang dihadapi oleh posyandu Babakan Surabaya RW 15. Disebut juga oleh Kepala kader kesehatan Babakan Surabaya Ibu Rina bahwa memang ada penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Alasan penonaktifan adalah karena adanya validasi data yang berbasis NIK. Meskipun pasien digratiskan dalam pelayanan, diharapkan permasalahan ini segera diselesaikan agar penyelenggaraan JKN-KIS dapat berjalan maksimal.

2.1.2 Tinjauan Konsep dan Teori

2.1.2.1 Konsep Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Menurut Undang-Undang N0 24 tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam Undang Undang No 24 tahun 2011 dicantumkan bahwa ada 2 Jenis BPJS yaitu, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program:

1) Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

2) Jaminan Hari Tua

Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Besarnya manfaat jaminan hari tua ditentukan berdasarkan seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya.

3) Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Manfaat jaminan pensiun dibayarkan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun sesuai formula yang ditetapkan.

4) Jaminan Kematian

Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Adapun manfaat jaminan kematian berupa uang tunai dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah klaim diterima dan disetujui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Besarnya manfaat jaminan kematian ditetapkan berdasarkan suatu jumlah nominal tertentu.

5) Mengelola data peserta program Jaminan Sosial
6) Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program

Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tugas BPJS sesuai penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 10 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah sebagai berikut:

1. Melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta, memungut dan
2. Mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
3. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah, Mengelola Dana Jaminan Sosial.
4. Untuk kepentingan peserta
5. Mengumpulkan dan Jaminan Sosial; dan
6. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas, BPJS berwenang untuk:

1. Menagih pembayaran iuran

2. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai
3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional
4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah
5. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;
6. Mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
7. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
8. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

2.1.3 Proses Asesmen

2.1.3.1 Teknik Asesmen

Teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi sumber adalah:

1. Home Visit

   Home visit (kunjungan rumah atau tempat) merupakan salah satu teknik yang digunakan praktikan dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan mengunjungi langsung lokasi di kader posyandu RW 15 yang ada di kelurahan Babakan Surabaya untuk memperoleh data, dan keterangan permasalahan penonaktifan KIS melalui kunjungan langsung ke lokasi.

2. Wawancara

   Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang ada di RW 15 mengenai penonaktifan KIS, dan juga apabila praktikan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik wawancara ini digunakan dengan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai apa saja permasalahan yang mereka alami. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data dan informasi dari narasumber.

2.1.3.2 Tahapan Asesmen

Kegiatan asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah kebutuhan, potensi dan sumber daya terkait isu masalah Analis Jaminan Sosial yang ada di kelurahan Babakan Surabaya dilakukan dengan tahapan.

Mengidentifikasi permasalahan yang ada di RW 15 terkait jaminan sosial di kelurahan Babakan Surabaya bahwa terdapat penyebab dan dampak bagi penonaktifan JKN KIS tersebut. Berdasarkan informasi dari Ibu Rina mengenai penonaktifan KIS maka saya (praktikan) memperoleh informasi untuk menemui

warga yang mengalami permasalahan tersebut. Proses asesmen berlangsung di kader Posyandu RW 15, kelurahan Babakan Surabaya. Asesmen pengumpulan data dilakukan dengan teknik home visit dan wawancara, home visit berkunjung langsung ke RW 15 kelurahan Babakan Surabaya untuk mengetahui permasalahan yang ada pada warga RW 15, wawancara dilakukan upaya memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai apa saja permasalahan yang mereka alami.

2.1.4 Hasil Asesmen

2.1.4.1 Identifikasi Masalah

Masalah merupakan sesuatu yang tidak diinginkan. Masalah merupakan sesuatu yang harus diatasi dan dicarikan solusi penanganannya sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Sugiyono (2009:52) masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksana. Adapun masalah JKN-KIS yang dihadapi masyarakat di Kecamatan Kiaracondong RW 15 dijabarkan melalui analisis pohon masalah. Praktikan menyajikan tools analisis pohon masalah untuk memudahkan dalam proses asesmen.

2.1.4.2 Analisis Pohon Masalah

Pohon masalah merupakan sebuah pendekatan/metode yang digunakan untuk identifikasi penyebab suatu masalah. Analisis pohon masalah dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih terstruktur mengenai komponen sebab akibat yang berkaitan dengan masalah yang telah diprioritaskan.

Gambar 2.1 Pohon Masalah Analis Jaminan Sosial

1) Penyebab masalah

Berdasarkan proses asesmen melalui studi dokumentasi ditemukan beberapa penyebab masalah yang berkaitan dengan kepesertaan dalam program JKN-KIS BPJS Kesehatan, yaitu:

1. NIK peserta yang tidak valid disebabkan adanya NIK ganda Ada peserta yang ketika diperiksa kepesertaannya tidak valid karena adanya NIK yang sama. Peserta tidak bisa mendaftarkan diri karena NIKnya telah digunakan oleh orang lain. Kesamaan NIK ini menyebabkan nama peserta di dalam kepesertaan BPJS Kesehatan tidak valid.
2. Penolakan data masyarakat pada sistem ketika peserta datang ke rumah sakit untuk mengantarkan orangtuanya berobat, tiba-tiba Kartu Indonesia Sehat yang dimiliki tidak dapat digunakan. Kepala Kader Kesehatan Babakan Surabaya RW 15, Ibu Rina menjelaskan, per Januari 2022 memang ada penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI. Alasan penonaktifan itu, menurut dia, diantaranya validasi data, karena harus berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Untuk PBI APBN berbasis data terpadu kesejahteraan sosial, belum terekam secara KTP Elektronik, dan penyesuaian kenaikan tarif dengan ketersediaan anggaran.

2) Dampak Masalah

Untuk suatu penyebab akan ada dampak yang ditimbulkan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari beberapa penyebab di atas yaitu diantaranya:

1. Masyarakat tidak dapat berobat menggunakan KIS hasil penelusuran praktikan ditemukan bahwa ada peserta PBI-JKN dan non PBI yang terkendala ketika akan memanfaatkan layanan.
2. Implementasi Kartu Indonesia Sehat tidak maksimal Dari permasalahan di atas terlihat terlihat bahwa pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kecamatan Kiaracondong RW 15 tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Masih ditemukan kendala-kendala yang dialami menunjukkan implementasi yang tidak maksimal.

3) Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus permasalahan adalah Penonaktifan JKN-KIS di Kecamatan Kiaracondong yang dialami oleh beberapa anggota JKN KIS.

2.1.4.3 Identifikasi Potensi dan Sumber

Sistem sumber dalam kesejahteraan sosial dalam praktek pekerjaan sosial asset yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Alan Pincus dan Minahan (1973:4) membagi ruang lingkup sistem sumber kesejahteeraan sosial menjadi tiga:

1. **Sumber informal**

   Sumber informal dapat berupa keluarga, teman, tetangga, orang lain yang bersedia membantu, dukungan emosional, kasih sayang, informasi, dan pelayanan konkrit lainnya. Sistem sumber informal yang dapat dimanfaatkan yaitu keluarga dari pihak yang memiliki permasalahan kepesertaan.

2. **Sumber formal**

   Sumber formal merupakan suatu organisasi atau asosiasi formal yang bertujuan untuk meningkatkan minat anggota mereka. Sumber formal yang dapat dimanfaatkan yaitu BPJS Kesehatan Kecamatan Kiaracondong. BPJS Kesehatan berperan sebagai educator bagi masyarakat yang menjadi peserta PBI-JKN yang tidak dapat mengakses layanan JKN-KIS.

3. **Sistem Sumber Kemasyarakatan**

   Sistem sumber ini berupa rumah sakit, badan adopsi, program latihan kerja, dan pelayanan resmi.

2.1.5 Rencana Intervensi

2.1.5.1 Latar Belakang

Penyebab permasalahan yang dialami oleh beberapa orang di Kecamatan Kiaracondong RW 15 terkait pemanfaatan JKN-KIS, yaitu NIK peserta yang tidak valid disebabkan adanya NIK ganda, kepesertaan tidak valid karena adanya NIK yang sama, dan penolakan data masyarakat pada sistem. Oleh karena itu, praktikan merancang rencana intervensi untuk pemecahan masalah tersebut.

2.1.5.2 Nama Program

"Sosialisasi BPJS JKN-KIS di Kelurahan Babakan Surabaya"

2.1.5.3 Tujuan umum dan khusus

Tujuan Umum

Tujuannya yaitu supaya masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan pelayanan JKN KIS PBI secara maksimal serta mampu memberi masukan mengenai hal-hal apa saja yang masih kurang dalam pelaksanaan JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan.

Tujuan Khusus

Adapun tujuan secara khusus yaitu:

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pengecekan status JKN KIS.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya JKN-KIS BPJS Kesehatan.

2.1.5.4 Bentuk Kegiatan dan Program

Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep BPJS Kesehatan dan prosedur pengecekan status kepesertaan agar dapat memperoleh hak sebagai Penerima Bantuan Iuran JKN-KIS. Adapun bentuk kegiatannya berupa:

1. **Sosialisasi**

   Sosialisasi merupakan proses pembelajaran melalui penyebarluasan informasi. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menambah pengetahuan, informasi dan terjalinnya komunikasi serta penyadaran diri melalui pemberian materi dalam rangka peningkatan pemahaman mengenai JKN-KIS BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Melalui sosialisasi, maka akan menghemat waktu dan tenaga mengingat jumlah sasaran kegiatan dalam lingkup yang cukup besar.

2. **Forum Group Discussion (FGD)**

   Forum Group Discussion merupakan salah satu bentuk komunikasi di dalam kelompok. Pada diskusi ini diharapkan masyarakat RW 15 yang merupakan PBI JKN-KIS, Puskesmas Babakan Surabaya BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan saling berkomunikasi tentang permasalahan yang terjadi.

2.1.5.5 Sistem Partisipan

Tabel 2.1 Sistem Partisipan: "Sosialisasi BPJS JKN-KIS di Kecamatan Kiaracondong.

No.	Sistem	Partisipan
1.	*Inisiator System*	Pihak BPJS
2.	*Change agent system*	Pihak BPJS
3.	*Client system*	Masyarakat Babakan Surabaya, RW 15 yang dinonaktifkan dari kepesertaan JKN KIS PBI
4.	*Controling system*	BPJS Kesehatan Babakan Surabaya
5.	*Target System*	Masyarakat Babakan Surabaya dan pemerintah setempat
6.	*Action system*	Pihak BPJS dan BPJS Kesehatan Babakan Surabaya
7.	*Support System*	BPJS kesehatan Babakan Surabaya
8.	*Implementing System*	1. Pihak BPJS 2. Pihak pemerintah 3. BPJS kecamatan Kiaracondong 4. Dinas kesehatan Kecamatan Kiaracondong

2.1.5.6 Metode dan Teknik

Metode yang akan digunakan dalam melaksanakan Program yaitu dengan menggunakan Community Organization/Community Development (CO/CD). Community Organization dilakukan dalam rangka menolong individu, kelompok, dan masyarakat untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui usaha bersama yang terencana.. Metode ini digunakan untuk mambantu masyarakat di kecamatan Kiaracondong untuk mendapat pelayanan dalam program JKN-KIS.

Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan program ini adalah dengan penyuluhan sosial. Menurut Permensos No 10 tahun 2014, Penyuluhan sosial adalah sebuah proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial, baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran, sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna partisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam program ini, penyuluhan dilakukan bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman mengenai BPJS, tata cara dan prosedur pengecekan status kepesertaan dalam mendapatkan pelayanan dari JKN-KIS sebagai program dari BPJS.

2.1.5.7 Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dubutuhkan

Setiap program pasti membutuhkan anggaran. Anggaran merupakan faktor penting dalam proses pelaksanaan program. Keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.2 Rencana Anggaran Biaya: "Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kecamatan Kiaracondong.

Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan(RP)	Jumlah (RP)
Logistik				
Sound System	2	unit	180.000	360.000
In focus	1	unit	150.000	150.000
ATK	1	Paket	25.000	25.000
Banner	2×4	Meter	25.000	25.000
Jumlah 1				560.000
Honor				
Honor pemateri	2	Jam	400.000	800.000
Jumlah 2				800.000
Konsumsi				
Snack pemateri	2	Box	10.000	20.000
Snack peserta	25	Box	5.000	125.000
Makan siang pemateri	2	Box	25.000	50.000
Makan siang peserta	25	Box	25.000	500.000
Jumlah 3				695.000
Jumlah keseluruhan				2.055.000

2.1.5.8 Analisis Kelayakan Program

2.1 Analisis SWOT Program: "Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kecamatan Kiaracondong.

SWOT	Kekuatan (STRENGTH)	Kelemahan (WEAKNESS)
	1. Adanya narasumber yang tepat berasal dari BPJS Kesehatan. 2. Dukungan oleh pemerintah daerah 3. Adanya partisipasi dan dukungan yang tinggi dari masyarakat.	Kemungkinan peserta tidak dapat memahami materi yang disampaikan
PELUANG (OPPORTUNITY)	SO	WO
1. Dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengecekan keaktifan KIS sebelum digunakan. 2. Pelayananan BPJS kesehatan kepada masyarakat semakin meningkat	Dengan melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan instansi terkait	Penyampaian sosialisasi dengan komunikasi dua arah sehingga audiens tidak kebingungan dan jenuh
TANTANGAN (THREAT)	ST	WS
Peserta tidak datang mengikuti kegiatan	Membuat doorprize supaya kegiatan lebih menarik	Melakukan evaluasi dan diadakannya sosialisasi secara berkala

2.1.5.9 Jadwal dan Langkah-langkah

Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal pelaksanaan program dengan tujuan memperoleh hasil yang maksimal. Tahapan ini dilakukan sebelum pelaksanaan inti program yang dilakukan melalui tahap berikut:

1. Tahap Koordinasi

Pada kegiatan koordinasi ini pihak BPJS melakukan koordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan, kader kesehatan, posiandu dengan tujuan agar pihak terkait mengetahui bahwa akan dilaksanakannya suatu program di Puskesmas Babakan Surabaya dan ikut serta berperan dalam pelaksanaan program.

2. Tahap pengenalan program

Tahap pengenalan program ini bertujuan untuk melakukan pengenalan rencana program yang akan dijalankan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan. Pihak yang terlibat yaitu BPJS Kesehatan, kader Kesehatan, posiandu.

3. Pembentukan kepanitiaan

Tahap ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan dapat terkoordinasi dan terorganisir dengan baik. Kepanitiaan dibentuk berdasarkan hasil diskusi pihak yang terlibat dalam kegiatan. Kepanitiaan yang terbentuk hasil kesepakatan bersama sehingga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

4. Identifikasi kebutuhan

Identifikasi kebutuhan dilakukan oleh penyelenggara kegiatan meliputi narasumber, alat, sarana dan prasarana. Identifikasi ini memudahkan panitia dalam mempersiapkan kegiatan. Pada program ini narasumber yang dijadikan pemateri adalah pihak dari BPJS Kesehatan Kecamatan Kiaracondong. Narasumber akan menyampaikan materi tentang konsep pelaksanaan program BPJS Kesehatan dan prosedur untuk mengakses pelayanan JKN-KIS.

5. Penentuan peserta

Peserta pada program ini adalah masyarakat penerima PBI yang menjadi perwakilan dari tiap Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Kiaracondong untuk mengikuti kegiatan sosialisasi serta diskusi. Selain itu, aparat Desa/Kelurahan seperti RT dan RW juga turut mengikuti kegiatan tersebut. Adapun sistem sasaran yang menjadi peserta bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai konsep pelaksanaan program BPJS Kesehatan dan prosedur untuk mengakses pelayanan JKN-KIS.

6. Menentukan jadwal pelaksanaan

Panitia yang telah terbentuk membuat perencanaan program dengan menentukan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan pertama adalah sosialisasi dengan estimasi waktu 90 puluh menit. Kemudian,setelah kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan diskusi bagi masyarakat dengan estimasi waktu 30 menit.

7. Penyusunan rencana anggaran

Untuk melakukan suatu program maka panitia pelaksana membutuhkan biaya. Rencana anggaran dibuat sesuai dengan seluruh tahapan program. Sumber dana berasal dari BPJS Kesehatan Kecamatan Kiaracondong.

8. Menentukan lokasi sosialisasi

Panitia pelaksana melaksanakan tugas untuk mempersiapkan tempat yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan. Tempat tersebut harus mudah dijangkau dan menampung seluruh peserta.

Tahap Pelaksanaan

1. Sosialisasi mengenai Pelaksanaan BPJS Kesehatan

Materi pada kegiatan sosialisasi konsep pelaksanaan program BPJS Kesehatan. Materi ini disampaikan oleh pihak BPJS Kesehatan. Akan disampaikan juga mengenai prosedur pengecekan status kepesertaan sebagai syarat agar dapat mengakses pelayanan JKN-KIS juga akan disampaikan.

2. Diskusi

Pada kegiatan diskusi, panitia memberikan waktu kepada masyarakat untuk bertanya terkait konsep Penyelenggaraan JKN-KIS yang tidak dapat dimengerti dan prosedur pengecekan status kepesertaan JKN KIS. Sehingga masyarakat memahami lebih detail penyelenggaraan JKN-KIS di Kiaracondong.

Tahap Pengakhiran

1. Evaluasi kegiatan

Evaluasi merupakan kegiatan penting dalam menilai tingkat keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan. Pada kegiatan ini, pelaksana program dan panitia melakukan kegiatan evaluasi terhadap proses untuk melihat tingkat kesuksesan proses pada setaip tahapan. Panitia akan membahas hambatan atau kendala yang dialami pada saat pelaksanaan kegiatan dalam program Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kecamatan Kiaracondong.

2. Penyusunan Laporan

Kegiatan pelaporan merupakan tahapan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Seluruh panitia akan menyusun suatu laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban.

2.2 Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

2.2.1 Gambaran Umum Masalah

UMKM dimana kepanjangan dari Usaha Mikro Kecil dan Menegah merupakan organisasi yang mempunyai sifat bermanfaat dan dimiliki oleh orang atau unsur usaha, yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM: (a) Usaha mikro merupakan organisasi bermanfaat diklaim oleh individu atau kelompok usaha berdasarkan ketentuan Usaha Mikro dalam pedoman Undang-undang ini. (b) Usaha kecil adalah bisnis keuangan bermanfaat yang didirikan oleh individu atau kelompok usaha di luar organisasi pendukung atau bagian dari organisasi yang diklaim atau merupakan bagian langsung atau sekali lagi dengan saran dalam usaha menengah sesuai dengan pemenuhan standar sebagai usaha swasta dalam demonstrasi ini. (c) Usaha menengah adalah bisnis yang membantu dan mandiri oleh perseorangan atau kelompok usaha selain tangan kanan atau bagian dari asosiasi yang diklaim atau merupakan bagian langsung / tidak langsung dalam usaha menengah sesuai dengan pemenuhan kriteria sebagai Usaha Menengah dalam Undang-Undang ini.

Bontis (2005) menyebutkan bahwa ada beberapa bagian yang dimiliki intellectual capital khususnya modal manusia, modal klien dan modal struktural yang memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam peningkatan kinerja keuangan usahanya. Menurut Prasojo & dkk (2017) menyebutkan bahwa human capital menunjukkan bagaimana suatu usaha dalam menemukan jalan keluar yang terbaik saat berhadapan dengan permasalahan melalui skill dan pengetahuan yang dimiliki oleh anggotanya. Human capital dalam permasalahan UMKM berkaitan

dengan kemampuan mengenai pengetahuan pasar yang masih minim, pengetahuan mengenai spesifikasi produk yang pasar butuhkan masih kurang, pengetahuan mengenai aturan untuk memasuki pasar masih kurang, dan pengetahuan persaingan bisnis juga masih kurang. Maka diperlukannya pemanfaatan human capital untuk meningkatkan kinerja keuangan UMKM dan juga dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM.

2.2.2 Tinjauan Konsep dan teori

UMKM selalu diupayakan untuk berdaya. Tujuan pemberdayaannya dalam UU 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini adalah untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.

UMKM memiliki Undang-Undang tersendiri. UU 20 tahun 2008 tentang UMKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Juli 2008 di Jakarta. UU 20 tahun 2008 tentang UMKM diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 dan Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866, oleh Menkumham Andi Matalatta pada tanggal 4 Juli 2008 di Jakarta.

2.2.3 Proses Asesmen

2.2.3.1 Teknik Asesmen

Teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan potensi sumber adalah:

1.) Home Visit

Home Visit (kunjungan rumah/tempat) merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan praktikan dengan cara mengunjungi RW 09 Kelurahan Babakan Surabaya untuk memperoleh data, keterangan kemudahan dan komitmen bagi permasalahan melalui kunjungan ke rumahnya, yang tujuannya untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang permasalahan yang ada pada bantuan UMKM tidak tepat sasaran sehingga home visit yang dilakukan berjalan dengan lancar.

2.) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang ada di RW 09 mengenai bantuan UMKM tidak

tepat sasaran, dan juga apabila praktikan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalan. Teknik wawancara ini digunakan dengan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai apa saja permasalahan yang mereka alami. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data dan informasi dari narasumber.

2.2.3.2 Tahapan Asesmen

Kegiatan asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, potensi dan sumber daya terkait isu masalah Sumber Dana Bantuan Sosial yang ada di Kelurahan Babakan Surabaya dilakukan dengan tahapan.

Mengidentifikasi apa saja permasalahan dalam pengelolaan bantuan UMKM tidak tepat sasaran di RW 09 Kelurahan Babakan Surabaya, apa saja permasalahan dan pengelolaan dan penyaluran bantuan UMKM, dan tidak adanya pemahaman terhadap bantuan UMKM. Berdasarkan informasi dari RW 09 bahwa, masih terdapat rumah tangga yang seharusnya menerima bantuan UMKM yang tidak mampu tetapi bantuan itu diberikan kepada orang yang dianggap mampu juga.

Proses asesmen berlangsung dilakukan di rumah RW 09 Kelurahan Babakan Surabaya. Asesmen pengumpulan data dilakukan dengan teknik home visit dan wawancara, homevisit kunjungan langsung ke rumah Ibu Imas RW 09 untuk mengetahui kondisi dan permasalahan bantuan UMKM tidak tepat sasaran dilakukan upaya memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai apa saja permasalahan yang mereka alami.

2.2.4 Hasil Asesmen

2.2.4.1 Identifikasi Masalah

Menurut informasi yang didapatkan oleh praktikan dari Ibu Imas, tidak adanya informasi penerima bantuan UMKM, warga tidak adanya pemahaman terhadap bantuan UMKM, masih terdapat rumah tangga yang seharusnya menerima bantuan UMKM yang tidak mampu tetapi bantuan itu diberikan kepada orang yang dianggap mampu juga jadi bantuan itu tidak tetap sasaran karena seharusnya bantuan untuk masyarakat miskin dan dampaknya yang miskin tetap miskin dan tidak dapat bantuan tersebut.

2.2.4.2 Analisis Pohon Masalah

Pohon masalah merupakan sebuah pendekatan/metode yang digunakan untuk identifikasi penyebab suatu masalah. Analisis pohon masalah dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih terstruktur mengenai komponen sebab akibat yang berkaitan dengan masalah yang telah diprioritaskan. Metode ini dapat diterapkan apabila sudah dilakukan identifikasi dan penentuan prioritas masalah.

Gambar 2.2 Pohon Masalah Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

1) Penyebab Masalah

Ada beberapa penyebab permasalahan, yaitu:

1. Kurangnya informasi mengenai bantuan dan pendataan

   Penerima bantuan itu dari daerah. Daerah harus melakukan pendataan. Karena sebetulnya tidak ada yang tidak bisa karena ada perangkat kelurahan, perangkat kecamatan dan ada perangkat desa, yang bisa dilakukan sendiri.

   2. Masih terdapat rumah tangga yang seharusnya menerima bantuan UMKM.

   Bantuan UMKM di RW 09 untuk masyarakat yang tidak mampu tetapi bantuan itu diberikan kepada orang yang dianggap mampu juga, jadi bantuan itu tidak tepat sasaran karena seharusnya bantuan untuk masyarakat miskin.

2) Dampak Masalah

Untuk suatu penyebab akan ada dampak yang ditimbulkan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari beberapa penyebab diatas yaitu antaranya:

1. Program pemberdayaan UMKM di Kecamatan Kiaracondong, RW 09, penyaluran tidak tepat sasaran bantuan tersebut tujuan untuk masyarakat yang tidak mampu tetapi penyaluran bantuan diberikan kepada orang yg dianggap mampu juga, sehingga masyarakat yang miskin tetap akan miskin dan tidak dapat bantuan tersebut.

3) Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat di simpulkan bahwa yang menjadi fokus masalah yaitu Bantuan UMKM tidak tepat sasaran.

2.2.4.3 Identifikasi Kebutuhan

Kebutuhan masyarakat di Kecamatan Kiaracondong RW 09, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kesadaran warga RW 09, tentang UMKM tidak tepat sasaran.
2. Kebutuhan untuk membuat komitmen dalam pengelolaan UMKM.

2.2.4.4 Identifikasi potensi dan sumber

Sistem sumber dalam kesejahteraan sosial dalam praktek pekerjaan sosial asset yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Alan Pincus dan Minahan (1973:4) membagi ruang lingkup sistem sumber kesejahteraan sosial menjadi tiga.

1. Sumber informal

Sumber informal dapat berupa keluarga, teman, tetangga, orang lain yang bersedia membantu, dukungan emosional, kasih sayang, informasi, dan pelayanan konkrit lainnya. Sistem sumber informal yang dapat dimanfaatkan yaitu keluarga dari pihak masyarakat RW 09.

2. Sumber formal

Sumber formal merupakan suatu organisasi atau asosiasi formal yang bertujuan untuk meningkatkan minat anggota mereka.

3. Sistem sumber kemasyarakatan

Sistem sumber ini berupa pekerja sosial yang berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat dan Unit Kewirausahaan Poltekesos Bandung yang berperan sebagai edukator bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan.

2.2.5 Rencana Intervensi

2.2.5.1 Nama Program

"Sosialisasi mengenai bantuan UMKM tidak tepat sasaran di Kelurahan Babakan Surabaya RW 09"

2.2.5.2 Tujuan umum dan khusus

Tujuannya yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Adapun tujuan khusus yaitu memperluas lapangan pekerjaan serta memberi pelayanan ekonomi kepada masyarakat secara luas.

2.2.5.3 Bentuk kegiatan dan Program

1. Sosialisasi

   Sosialisasi merupakan proses pembelajaran melalui penyebarluasan informasi. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menambah pengetahuan, informasi dan terjalinnya komunikasi.

2. Focus Group Discussion (FGD)

   Diskusi merupakan salah satu bentuk komunikasi di dalam kelompok. Pada diskusi ini diharapkan masyarakat RW 09 Kecamatan Kiaracondong sebagai penerima bantuan UMKM.

2.2.5.4 Sistem Partisipan

Tabel 2.3 Sistem Partisipan: "Sosialisasi mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Kiaracondong.

No.	Sistem	Partisipan
1.	*Inisiator System*	Pihak pemerintah
2.	*Changen Agent System*	Pihak pemerintah
3.	*Client System*	Anggota UMKM (masyarakat RW 09 kecamatan Kiaracondong)
4.	*Controling System*	Usaha Mikro Kecil Menengah
5.	*Target System*	Anggota UMKM (masyarakat RW 09 kecamatan Kiaracondong)
6.	*Action System*	Pihak pemerintah Usaha Mikro Kecil Menengah
7.	*Support System*	Usaha Mikro Kecil Menengah RW 09
8.	*Implementing System*	Pihak pemerintah

2.2.5.5 Metode dan Teknik

Metode

Metode yang akan digunakan dalam melaksanakan Program yaitu dengan menggunakan *Community Organization/Community Development (CO/CD). Community Organization* yaitu suatu proses intervensi yang dilakukan dalam rangka menolong individu, kelompok, dan masyarakat untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui usaha bersama yang terencana.. Metode ini digunakan untuk mambantu masyarakat di RW 09 Kecamatan Kiaracondong.

Teknik

Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan program ini adalah dengan penyuluhan sosial. Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan program ini adalah dengan penyuluhan sosial. Menurut Permensos No 10 tahun 2014, Penyuluhan sosial adalah sebuah proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial, baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran,sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna partisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam program

ini, penyuluhan dilakukan bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman mengenai pengetahuan.

2.2.5.6 Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

Setiap program pasti membutuhkan anggaran. Anggaran merupakan faktor penting dalam proses pelaksanaan program. Keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.4 Rencana Anggaran Biaya: "Sosialisasi Mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah Di kecamatan Kiaracondong.

Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (RP)	Jumlah (RP)
Logistik				
Sound System	2	Unit	180.000	360.000
In focus	1	Unit	150.000	150.000
ATK	1	Paket	25.000	25.000
Banner	2×4	Meter	25.000	25.000
Jumlah 1				560.000
Honor				
Honor Pemateri	2	Orang/jam	400.000	400.000
Konsumsi				
Snack Peserta	25	Box	5.000	125.000
Snack Pemateri	2	Box	10.000	20.000
Jumlah 2				945.000
Jumlah Keseluruhan				1.505.000

2.2.5.7 Analisis Kelayakan Program

Sebuah program kegiatan agar dapat dilaksanakan memerlukan suatu analisis kelayakan. Berdasarkan hal ini, praktikan menggunakan analisis SWOT yang merupakan analisis manajemen mengenai kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat) yang akan dihadapi dalam melaksanakan program atau kegiatan. Adapun analisis SWOT dalam program ini akan disajikan dalam gambar berikut ini.

Matrix 2.2 Analisis SWOT Program: "Sosialisasi Mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Kiaracondong.

SWOT	Kekuatan (STRENGTH)	Kelemahan (WEAKNESS)
	Dukungan oleh masyarakat melalui partisipasi yang aktif dalam mengikuti sosialisasi. Pemerintah desa yang memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi	Beberapa masyarakat tidak memahami bahasa indonesia dengan baik
Peluang (OPPORTUNITY)	SO	WO
Dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai manfaat dan fungsi Usaha Mikro Kecil Menengah dan pengelolaannya	Dengan melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah setempat dan instansi terkait	Penyampaian sosialisasi dengan komunikasi dua arah dan bahasa yang mudah dimengerti sehingga audiens tidak kebingungan dan jenuh
Tantangan (THREAT)	ST	WS
Kemungkinan peserta tidak datang mengikuti kegiatan	Memberikan kesempatan kepada warga untuk menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pelatihan Mengadakan liwetan untuk seluruh partisipan	Melakukan evaluasi untuk perbaikan di program selanjutnya

2.2.5.8 Jadwal dan Langkah-Langkah

Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal pelaksanaan program dengan tujuan memperoleh hasil yang maksimal. Tahapan ini dilakukan sebelum pelaksanaan inti program yang dilakukan melalui tahap berikut:

1. Tahap Koordinasi
   Pada kegiatan koordinasi ini pihak pemerintah melakukan koordinasi dengan pihak UMKM, RW 09 kecamatan Kiaracondong.
2. Tahap pengenalan program

Tahap pengenalan program ini bertujuan untuk melakukan pengenalan rencana program yang akan dijalankan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan. Pihak yang terlibat yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah RW 09

3. Pembentukan kepanitiaan
   Tahap ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan dapat terkoordinasi dan terorganisir dengan baik. Kepanitiaan dibentuk berdasarkan hasil diskusi pihak yang terlibat dalam kegiatan. Kepanitiaan yang terbentuk hasil kesepakatan bersama sehingga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
4. Identifikasi kebutuhan
   Identifikasi kebutuhan dilakukan oleh penyelenggara kegiatan meliputi narasumber, alat, sarana dan prasarana. Identifikasi ini memudahkan panitia dalam mempersiapkan kegiatan. Narasumber akan menyampaikan materi mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah.
5. Penentuan peserta
   Peserta pada program ini adalah masyarakat RW 09 Kecamatan Kiaracondong. Selain itu, aparat Desa/Kelurahan seperti RW 09 juga turut mengikuti kegiatan tersebut. Adapun sistem sasaran yang menjadi peserta bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai manajemen keuangan.
6. Menentukan jadwal pelaksanaan
   Panitia yang telah terbentuk membuat perencanaan program dengan menentukan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan pertama adalah sosialisasi dengan estimasi waktu 60 menit. Kemudian, setelah kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan diskusi bagi masyarakat dengan estimasi waktu 30 menit.
7. Menentukan lokasi sosialisasi
   Panitia pelaksana melaksanakan tugas untuk mempersiapkan tempat yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan. Tempat tersebut harus mudah dijangkau dan menampung seluruh peserta, yaitu kelurahan babakan surabaya.

Tahap Pengakhiran

1. Evaluasi kegiatan
   Evaluasi merupakan kegiatan penting dalam menilai tingkat keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan. Pada kegiatan ini, pelaksana program dan panitia melakukan kegiatan evaluasi terhadap proses untuk melihat tingkat kesuksesan proses pada setiap tahapan. Panitia akan membahas hambatan atau kendala yang dialami pada saat pelaksanaan kegiatan dalam program “Sosialisasi mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Kiaracondong”
2. Penyusunan laporan

Kegiatan pelaporan merupakan tahapan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Seluruh panitia akan menyusun suatu laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban.

2.3 Profil Analis Pemberdayaan Sosial

2.3.1 Gambaran Umum Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan maya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa menyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial warga negara, termasuk lanjut usia (lanjut usia). Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya nyata yang dilakukan untuk mendukung kesejahteraan lansia. Menurut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Usia 60 tahun ke atas merupakan usia yang cukup rentan. Oleh karena itu, persoalan yang menjadi perhatian khusus bagi lansia adalah masalah kesehatan. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2020 yaitu salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma. Secara umum PKK merupakan komunitas dalam melakukan gerakan masyarakat yang lahir karena kebutuhan masyarakat. Misi PKK secara umum yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung (Dahniar, 2014:8). Di Kecamatan Kiaracondong terdapat kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK Kecamatan Kiaracondong memiliki 4 kelompok kerja. Dalam beberapa kelompok kerja, ada salah satu program yang dikhususkan untuk lansia yaitu posyandu lansia. Menurut data yang ditemukan praktikan di Kecamatan Kiaracondong, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia Flamboyan 1 yang terletak di RW 01, memiliki hambatan di dalam pelaksanaannya. Adanya beberapa hambatan yang dialami oleh Posyandu Lansia Flamboyan 1 menyebabkan kegiatan lansia tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga praktikan mencari solusi untuk penanganan yang tepat dalam menghadapi hal tersebut.

2.3.2 Tinjauan konsep dan teori

2.3.2.1 Pengertian Pemberdayaan

Secara umum pengertian pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan individu dan kelompok untuk mendorong kepercayaan diri masyarakat, sehingga dalam hal inilah maka kehidupan masyarakat di wilayah yang bersangkutan bisa bersaing dalam menumbukan atau meningkatkan perekonomiannya.

Adapun defenisi pemberdayaan menurut para ahli:

A. Daulay

Menurutnya, pemberdayaan adalah serangkaian wujud upaya yang dilakukan untuk mendorong masyarakat agar memiliki posisi tawar sehingga mampu menjadi pelaku dalam proses pembangunan yang partisipatif dan aktif

B. Slamet

Definisi pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat agar mampu membangun dirinya sendiri sehingga masyarakat dapat memperbaiki kehidupannya. Arti ini secara tidak langsung pemberdayaan diartikan sebagai kesempatan dalam melihat dan memanfaatkan peluang sehingga mampu mengambil suatu keputusan yang tepat yang sesuai dengan inisiatifnya.

C. Sumodiningrat

Arti empowerment atau pemberdayaan adalah serangkaian dukungan untuk meningkatkan kemampuan serta memperluasluaskan segala akses kehidupan sehingga mampu mendorong kemandirian yang berkelanjutan terhadap masyarakat.

D. Elizabeth

Pemberdayaan (empowerment) pada wanita merupakan upaya yang dilakukan untuk menunjukan penguatan terhadap segala yang berada dalam ketidakberdayaan sehingga pemberdayaan diharapkan mampu menolong dirinya sendiri dalam mengembangkan semangat kepercayaan yang telah ada.

2.3.2.2 Tujuan Pemberdayaan

Suharto (2005:60) menjelaskan hal yang senada bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai sebagai suatu proses dan juga tujuan. Menurut pandangannya, pemberdayaan masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sebagai sebuah proses

   Artinya disini pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat tak terkecuali masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan.

2. Sebagai tujuan

   Pemberdayaan masyarakat yang diartikan sebagai tujuan adalah keadaan yang ingin dicapai baik dari suatu perubahan sosial yang mana menjadi masyarakat yang lebih berdaya, memiliki kekuasaan juga pengetahuan dan kemampuan untuk dapay memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik lagi. Baik di sisi ekonomi maupun bersifat sosial seperti kepercayaan diri, dan sebagainya. Fahrudin (2012:96-97) dalam bukunya menjelaskan bagaimana

pemberdayaan masyarakat dapat memampukan dan memandirikan masyarakat, yakni sebagai berikut ini:

1) *Enabling*
   Pemberdayaan masyarakat dapat memungkinkan atau menciptakan suasana atau iklim yang memberi kesempatan potensi masyarakat untuk berkembang. Dengan adanya upaya pemberdayaan ini, diharapkan dapat mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) masyarakat akan potensi yang dimiliki dan berkelanjutan untuk dapat mengembangkannya.
2) *Empowering*
   Kedua, dengan adanya pemberdayaan masyarakat nantinya dapat meningkatkan kapasitas dengan cara memperkuat potensi atau daya yang dimiliki dengan langkah-langkah nyata seperti menyerap berbagai masukan atau input hingga serta membuka akses kepada berbagai peluang yang dapat semakin memberdayakan masyarakat.
3) *Protecting*
   Melengkapi dua poin diatas, poin selanjutnya adalah protecting atau melindungi yang dimana disini adalah mengembangkan perlindungan untuk masyarakat yang menjadi subjek pengembangan melalui pemberdayaan ini. Sebagai contohnya adalah melindungi agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat atau bahkan adanya eksploitasi dari yang kuat pada yang lemah.

2.3.2.3 Konsep Posyandu Lansia

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Dasar di Pos Pelayanan Terpadu, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lanjut Usia menurut Pedoman Pelaksanaan Posyandu Lanjut Usia oleh Komisi Nasional Lanjut Usia tahun 2010 adalah suatu wadah pelayanan kepada lanjut usia di masyarakat, yang proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM), lintas sektor pemerintah dan non-pemerintah, swasta, organisasi sosial dan lain-lain, dengan menitik beratkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan preventif. Disamping pelayanan kesehatan, di Posyandu Lanjut Usia juga dapat diberikan pelayanan sosial, agama, pendidikan, ketrampilan, olah raga dan seni budaya serta pelayanan lain yang dibutuhkan para lanjut usia dalam rangka meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Selain itu mereka dapat beraktifitas dan mengembangkan potensi diri.

Menurut Petunjuk Teknik Pelaksanaan Posyandu Lanjut Usia dan Posbindu PTM terintegrasi Kementerian Kesehatan RI tahun 2021 Tujuan posyandu lansia secara umum adalah untuk meningkatkan status kesehatan dan kualitas hidup lansia. Pelayanan kesehatan di posyandu lansia bersifat promotif dan preventif dalam bentuk deteksi dini masalah kesehatan, peningkatan pengetahuan, dan membantu mempertahankan dan meningkatkan kondisi kesehatan lansia baik fungsi fisik, psikologis dan sosialnya.

Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan yang dapat dilakukan di Posyandu Lansia diberikan kepada pra lansia dan lansia sebagai berikut:

1) Wawancara termasuk anamnesa perilaku berisiko (APR)
2) Pemeriksaan tingkat kemandirian, dengan menggunakan instrument penilaian Activity Daily Living (ADL)/Aktivitas Kegiatan Sehari-hari (AKS) (khusus untuk lansia).
3) Penilaian risiko jatuh (khusus untuk lansia).
4) Pemeriksaan status mental dan emosional, dengan menggunakan instrumen penilaian Geriatric Depression Scale (GDS) (khusus untuk lansia).
5) Pemeriksaan status kognitif, dengan menggunakan instrumen penilaian Abreviated Mental Test (AMT) atau Mini Cog dan Clock Drawing Test (CDT4) (khusus untuk lansia).
6) Pemeriksaan status gizi melalui penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan atau panjang depa, dan pengukuran lingkar perut.
7) Pengukuran tekanan darah dengan menggunakan tensimeter.
8) Pemeriksaan fisik termasuk deteksi dini adanya anemia, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran dan sebagainya.
9) Pemeriksaan laboratorium sederhana (kolesterol dalam darah, gula darah sewaktu dan asam urat). Dilakukan 1-2 kali setahun, kecuali yang mempunyai kelainan.
10) Melakukan rujukan ke Puskesmas atau Rumah Sakit bilamana ditemukan kelainan.
11) Penyuluhan secara berkelompok atau konseling secara perorangan sesuai dengan masalah kesehatan yang dihadapi oleh masing-masing lansia.
12) Kunjungan rumah oleh kader disertai petugas kesehatan bagi lansia yang tidak datang atau belum mau datang, agar tetap/mau berpartisipasi dalam kegiatan posyandu.
13) Kegiatan aktivitas fisik/latihan fisik antara lain senam low impact, senam vitalisasi otak lansia, gerak jalan santai dan lain sebagainya untuk meningkatkan kebugaran, serta kegiatan lain dalam rangka mempertahankan dan stimulasi fungsi kognitif.
14) Kegiatan lain yang dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi setempat:

a) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan sebagai contoh menu makanan dengan memperhatikan aspek kesehatan dan gizi lanjut usia,menggunakan bahan makanan lokal daerah tersebut. PMT lansia sebaiknya berupa makanan pokok berbasis pangan lokal, makanan tinggi serat, rendah lemak (tidak digoreng dan tidak bersantan).
b) Kegiatan pemberdayaan yang dapat dilakukan secara terpadu dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait. Misalnya pemberdayaan lansia dalam meningkatkan status kesehatan keluarga, penguatan keluarga dalam perawatan jangka panjang bagi lansia, pengembangan keterampilan dan pembuatan kerajinan tangan, rekreasi, dan lain-lain.

Sasaran

Sasaran Posyandu Lansia dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Sasaran Langsung
   a) Pra lanjut usia (usia 45 - 59 tahun)
   b) Lanjut usia (usia ≥ 60 tahun)
   c) Lanjut usia risiko tinggi, yaitu usia ≥ 70 tahun atau lansia berusia ≥ 60 tahun dengan masalah kesehatan.
2) Sasaran tidak langsung
   a) Keluarga dimana lansia berada
   b) Masyarakat di lingkungan lansia
   c) Petugas kesehatan yang melayani kesehatan lansia
   d) Kader kesehatan Posyandu Lansia
   e) Petugas lain yang menangani Posyandu Lansia
   f) Pemerintah desa/kelurahan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial yang peduli terhadap pembinaan kesehatan lansia

2.3.3 Proses Asesmen

2.3.3.1 Teknik Asesmen

1.) Home Visit

Home visit (kunjungan rumah/tempat) merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan praktikan dengan cara mengunjungi RW 01 yang ada di kelurahan Babakan Surabaya untuk memperoleh data keterangan, kemudahan dan komitmen bagi permasalahan melalui kunjungan di posyandu, yang tujuannya untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang permasalahan yang ada pada posyandu lansia sehingga home visit yang dilakukan berjalan dengan lancar.

2.) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang ada di RW 01 mengenai posyandu lansia wawancara dilakukan bersama ibu-ibu PKK perwakilan dari setiap RW, dan juga apabila praktikan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang

lebih mendalam. Teknik wawancara ini digunakan dengan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai apa saja permasalahan yang mereka alami. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data dan informasi dari narasumber.

2.3.3.2 Tahapan Asesmen

Kegiatan asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, potensi dan sumber daya terkait isu masalah Analis Pemberdayaan Sosial yang ada di Kelurahan Babakan Surabaya dilakukan dengan tahapan.

Mengidentifikasi permasalahan yang ada di Kelurahan Babakan Surabaya di RW 01 terkait posyandu lansia, apa penyebab dan dampak, kebutuhan dan potensi sumber daya lansia. Untuk memperoleh informasi saya (praktikan) menemui langsung di kader posyandu RW 01, yang memberikan infomasi mengenai data-data tidak berjalannya efektif posyandu lansia adalah Ibu Anih di RW 01.

Proses asesmen berlangsung dilakukan di Posyandu Lansia RW 01 Kelurahan Babakan Surabaya serta melalui media telpon, sebanyak 10 orang yang rutin melakukan pertemuan peserta di posyandu lansia. Asesmen pengumpulan data dilakukan dengan teknik home visit dan wawancara, homevisit kunjungan langsung ke kader posyandu RW 01 kelurahan Babakan Surabaya untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang ada, dan wawancara dilakukan secara langsung serta melalui telpon upaya memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai apa saja permasalahan yang mereka alami.

2.3.4 Hasil Asesmen

2.3.4.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah terkait lingkungan posyandu lansia di Kelurahan Babakan Surabaya, pada RW 01 terdapat lansia risiko tinggi usia 70 tahun atau lansia 60 tahun dengan masalah kesehatan.

Dalam mengidentifikasi masalah praktikan menggunakan teknik Analisis Pohon Masalah, Analisa masalah mengenai isu, banyaknya lansia risiko tinggi usia 70 atau 60 tahun di Kelurahan Babakan Surabaya. Pohon masalah dapat membantu untuk menganalisa permasalahan yang terjadi sehingga dapat mengetahui sebab akibat dan solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Batang pohon menggambarkan fokus dari isu atau masalah yang sedang terjadi, sedangkan ranting pohon menggambarkan akibat dari sebab yang diilustrasikan oleh akar pohon.

2.3.4.2 Analisis Pohon Masalah

Pohon masalah merupakan sebuah pendekatan/metode yang digunakan untuk identifikasi penyebab suatu masalah. Analisis pohon masalah dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih terstruktur mengenai komponen sebab

akibat yang berkaitan dengan masalah yang telah diprioritaskan. Metode ini dapat diterapkan apabila sudah dilakukan identifikasi dan penentuan prioritas masalah.

Gambar 2.3 Analisis pohon masalah pemberdayaan sosial

1) Penyebab masalah

Dari hasil Analisis pohon masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa penyebab permasalahan, yaitu:

a. Jarak tempuh menuju posyandu yang jauh.
   Beberapa lansia tidak menghadiri posyandu karena jarak menuju posyandu yang cukup jauh. Ada lansia yang datang jika ada pihak keluarga, sedangkan yang lainnya tidak dapat hadir karena pihak keluarga lansia tersebut memiliki pekerjaan.

b. Keterbatasan Jumlah tenaga medis
   Hanya ada seorang bidan desa yang melayani dalam pelaksanaan posyandu Lansia di seluruh posyandu yang ada di Kecamatan Kiaracondong RW 01. Bidan desa tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan di Posyandu, tetapi juga di Puskesmas lain Keterbatasan ini menyebabkan sulitnya pelaksanaan pemeriksaan lansia secara medis.

c. Kurangnya dukungan pemerintah desa
   Adanya posyandu awalnya diinisiasi oleh pemerintah desa yang mewajibkan tiap RW memiliki Posyandu Balita dan Lansia. Namun, pendanaan dari pemerintah desa hanya disediakan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu Balita. Selama ini, dana yang digunakan dalam pelaksanaan Posyandu Lansia berasal dari swadaya masyarakat, donatur, dan kenclengan (kotak kas) yang bersifat sukarela.

2) Dampak Masalah

Untuk suatu penyebab akan ada dampak yang ditimbulkan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari beberapa penyebab di atas yaitu diantaranya:

a. Keterbatasan informasi yang diterima lansia dan keluarga mengenai penyakit yang dialami. Selain faktor jarak tempuh dari rumah lansia ke posyandu yang jauh menyebabkan lansia dan keluarga mendapatkan informasi yang terbatas mengenai kondisi kesehatan lansia yang ada di rumah.
b. Pendanaan untuk pelaksanaan posyandu lansia yang terbatas Kurangnya kepedulian pemerintah pada posyandu khususnya pendanaan menyebabkan posyandu lansia hanya memiliki simpanan dana yang terbatas untuk melaksanakan setiap kegiatan dan program yang ada.
c. Minimnya kegiatan pada Bina Keluarga LansiaSelain dana, posyandu lansia membutuhkan dukungan pemerintah yaitu dengan menghadirkan pengurus PKK dan pihak desa lainnya untuk melihat dan ikut serta dalam Bina Keluarga Lansia. Posyandu Lansia Flamboyan 1 tidak bisa hanya mengandalkan kader-kader posyandu karena pelaksanaan BKL membutuhkan pihak yang memahami lebih dalam mengenai kesehatan lansia seperti, pola makan, gizi yang diperlukan lansia dan penyakit-penyakit yang sering dialami lansia.

3) Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus permasalahan adalah RW 01 Kelurahan Babakan Surabaya berkaitan dengan Posyandu Lansia yaitu Pelaksanaan Posyandu Lansia Flamboyan 1 yang tidak berjalan secara efektif.

2.3.4.3 Identifikasi Kebutuhan

Kebutuhan lansia di wilayah RW 01 Kecamatan Kiaracondong sebagai berikut:

1) Pengaktifan kembali posyandu lansia

Masyarakat lansia di RW 01 Kecamatan Kiaracondong membutuhkan pelayanan kesehatan berupa posyandu yang diadakan rutin seperti sebelumnya.

2) Adanya dana insentif yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan posyandu lansia.

Bantuan pendanaan dari pemerintah desa akan mendukung pelaksanaan pelaksanaan Posyandu Lansia Flamboyan 1 dan Bina Keluarga.

2.3.4.4 Identifikasi Potensi dan Sumber

Sistem sumber dalam kesejahteraan sosial dalam praktek pekerjaan sosial asset yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

Alan Pincus dan Minahan (1973:4) membagi ruang lingkup sistem sumber kesejahteeraan sosial menjadi tiga:

1) **Sumber informal**

Sumber informal dapat berupa keluarga, teman, tetangga, orang lain yang bersedia membantu, dukungan emosional, kasih sayang, informasi, dan pelayanan konkrit lainnya. Sistem sumber informal yang dapat dimanfaatkan yaitu keluarga dari pihak masyarakat lansia di RW 01 Kecamatan Kiaracondong dan masyarakat sekitar.

2) **Sumber formal**

Sumber formal merupakan suatu organisasi atau asosiasi formal yang bertujuan untuk meningkatkan minat anggota mereka.Sumber formal yang dapat dimanfaatkan yaitu pihak posyandu lansia yang berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat, pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, dan Pengurus Bina Keluarga Lansia.

3) **Sistem sumber kemasyarakatan**

Sistem sumber ini berupa Puskesmas lain sebagai fasilitator dan edukator dalam pelaksanaan posyandu lansia di RW 01 Kecamatan Kiaracondong.

2.3.5 Rencana Intervensi

2.3.5.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang

Pemerintah bertugas mengarahkan membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Peningkatan kesejahteraan bagi lanjut usia hanya dapat terlaksana apabila pemerintah mendukung dan memfasilitasi kegiatan yang ditujukan untuk lanjut usia melalui penguatan kapasitas kader Posyandu. Hasil asesmen di RW 01 Kecamatan Kiaracondong, praktikan menemukan kegiatan Posyandu yang dikhususkan untuk lansia tidak berjalan dengan baik dikarenakan beberapa faktor, diantaranya jarak tempuh menuju posyandu yang jauh, keterbatasan jumlah tenaga medis, kurangnya dukungan pemerintah desa. Oleh karena itu, praktikan merancang rencana intervensi untuk mengatasi permasalahan yang ada di Posyandu Lansia Flamboyan 1.

2.3.5.2 Nama Program

"Kegiatan pelayanan posyandu lansia"

2.3.5.3 Tujuan umum dan khusus

Tujuan Umum

Tujuan umum dari pelaksanaan program yaitu agar kader Posyandu dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan maksimal sehingga masyarakat lansia

di RW 01 Kecamatan Kiaracondong mendapatkan haknya sebagai peserta Posyandu Lansia Flamboyan 1.

Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari program ini yaitu:

1) Meningkatkan kesadaran pemerintah desa terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat lansia.
2) Meningkatkan pelayanan pemerintah desa dalam upaya pemberian dana bagi pelaksanaan kegiatan masyarakat.
3) Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mengenai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa selaku pemangku kepentingan di tingkat Desa.

2.3.5.4 Bentuk Kegiatan dan Program

1) Advokasi

Zastrow (1982) mengartikan advokasi adalah aktivitas menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau suatu sistem layanan, dan membantu memperluas pelayanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan. Kegiatan ini, bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah Desa dalam mengatur pelayanan Posyandu Lansia di Kecamatan Kiaracondong.

2) Focus Group Discussion (FGD)

Diskusi merupakan salah satu bentuk komunikasi di dalam kelompok. Pada diskusi ini diharapkan kader Posyandu, masyarakat lansia serta keluarga lansia menyampaikan apa saja yang menjadi ide, saran, dan masukan untuk perkembangan Posyandu Lansia Flamboyan 1 di masa yang akan datang.

2.3.5.5 Sistem Partisipan

Tabel 2.5 Sistem Partisipan: "Pelaksanaan Advokasi dan Forum Diskusi Posyandu Lansia Flamboyan 1.

No.	Sistem	Partisipan
1.	*Inisiator System*	Pihak posyandu Lansia
2.	*Changen agent system*	Pihak Posyandu Lansia
3.	*Client system*	Kader Posyandu Lansia Flamboyan 1 dan puskesman lain
4.	*Controling system*	Pihak posyandu Lansia
5.	*Target system*	Pemerintah kecamatan kiaracondong
6.	*Action System*	Pihak Posyandu Lansia
7.	*Support system*	Masyarakat RW 01 kecamatan kiaracondong dan puskesmas lain
8.	*Implementing system*	Pihak posyandu Lansia dan kader Posyandu Lansia Flamboyan 1

2.3.5.6 Metode dan Teknik

Metode yang akan digunakan dalam melaksanakan Program yaitu dengan menggunakan Community Organization/Community Development (CO/CD). Community Organization yaitu suatu proses intervensi yang dilakukan dalam rangka menolong individu, kelompok, dan masyarakat untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui usaha bersama yang terencana. Metode ini digunakan untuk mambantu masyarakat lansia di RW 01 Kecamatan Kiaracondong mendapatkan haknya sebagai peserta Posyandu Lansia.

Teknik yang digunakan yaitu advokasi. Advokasi menurut John Hopkins (1990) merupakan usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif. Advokasi dapat diartikan sebagai salah satu upaya pendekatan terhadap orang lain yang mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Advokasi dilakukan agar pemerintah Kecamatan Kiaracondong memberikan dukungan secara material dan moril dalam pelaksanaan Posyandu Lansia Flamboyan 1 di RW 01 Kecamatan Kiaracondong.

2.3.5.7 Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dubutuhkan

Setiap program pasti membutuhkan anggaran. Anggaran merupakan faktor penting dalam proses pelaksanaan program. Keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.6 Rencana Anggaran Biaya: "Pelaksanaan Advokasi dan Forum Diskusi Posyandu Lansia Flamboyan 1.

Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (RP)	Jumlah (RP)
Logistik				
ATK	1	Paket	25.000	25.000
Sound System	2	Unit	180.000	360.000
Jumlah 1				385.000
Konsumsi				
Snack Peserta	25	Box	5.000	125.000
Snack Panitia	2	Box	10.000	20.000
Jumlah 2				145.000
Jumlah keseluruhaan				530.000

2.3.5.8 Analisis Kelayakan Program

Tabel 2.3 Analisis SWOT Program: "Pelaksanaan Advokasi dan Forum Diskusi Posyandu Lansia Flamboyan 1.

SWOT	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	1. Adanya kebutuhan lansia berupa layanan pemeriksaan kesehatan yang harus dipenuhi 2. Dukungan oleh masyarakat setempat berupa partisipasi aktif dalam forum diskusi	Masyarakat yang kesulitan dalam penyampaian aspirasi yang dimiliki
PELUANG (OPPORTUNITY)	SO	WO
Dapat meningkatkan kesadaran pemerintah desa mengenai pentingnya dukungan pada kegiatan Posyandu Lansia	Dengan melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah setempat dan instansi terkait	Perwakilan dari pekerja sosial dan pihak kader supaya dapat menyampaikan aspirasi masyarakat.
TANTANGAN (THREAT)	ST	WS
Kemungkinan peserta tidak datang mengikuti kegiatan karena waktu dan jarak dari rumah ke lokasi pelaksanaan yang jauh	Memberikan kesempatan kepada warga untuk menentukan waktu yang tepat untuk melakukan advokasi. Memfasilitasi masyarakat yang jauh rumahnya dengan kendaraan	Melakukan evaluasi untuk perbaikan di program selanjutnya

2.3.5.9 Jadwal dan Langkah-langkah

Menurut Adi Fahrudin (2010), Advokasi merupakan proses dinamis yang menyangkut seperangkat pelaku, gagasan, agenda, dan politik yang selalu berubah. Proses advokasi ini dibagi menjadi beberapa tahap tahap, adapun rinciannya sebagai berikut:

1) Memilih tujuan advokasi

   Masalah yang diadvokasi mungkin sangat kompleks. Oleh sebab itu agar advokasi berhasil maka tujuan advokasi harus dipertajam sedemikian rupa. Tujuan advokasi ini adalah untuk mendapatkan dukungan kebijakan dari pemerintah Kecamatan Kiaracondong dalam pelaksanaan Program Posyandu Lansia.

2) Menggunakan data dan penelitian untuk advokasi

   Data dan penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat ketika memilih masalah yang akan diadvokasi, mengidentifikasi cara pemecahan bagi masalah tersebut, dan menentukan

tujuan yang realistis. Data yang valid, lengkap dan akurat juga dapat menjadi argumentasi yang kuat.

3) Mengidentifikasi sasaran advokasi
   Jika masalah dan tujuan telah ditetapkan, maka kegiatan advokasi harus diarahkan kepada orang-orang yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan misalnya staf, pimpinan, orang tua, media, dan masyarakat. Sasaran dari program advokasi ini adalah Pemerintah Kecamatan Kiaracondong dalam penyediaan dukungan dalam pelaksanaan Posyandu Lansia.
4) Mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi.
   Pesan mengenai pentingnya program pemberdayaan melali Posyandu Lansia dan pemberian Makanan Tambahan (PMT) saat Posyandu
   Lansia.
5) Membentuk koalisi
   Kekuatan advokasi kerapkali ditentukan oleh kuatnya koalisi beberapa orang, organisasi, atau lembaga yang mendukung tujuan advokasi. Bahkan melibatkan banyak orang yang mewakili kepentingan berbeda beda dapat memberi keuntungan dari sisi keamanan bagi advokasi maupun untuk memperoleh dukungan politik.
6) Membuat presentasi yang persuasif.
   Dalam pelaksanaan program, maka pihak yang melakukan advokasi menyampaikan presentasi mengenai informasi mengenai pelaksanaan Posyandu Lansia yang sudah baik.
7) Mengumpulkan dana untuk kegiatan advokasi
   Sumber dana dari kegiatan ini adalah dana dari pemerintah Kecamatan Kiaracondong.
8) Mengevaluasi usaha advokasi
   Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik atau masukan untuk membaiki strategi dan usaha advokasi.

2.4 Profil Analis Penataan Lingkungan Sosial

2.4.1 Gambaran Umum Masalah

Menurut Undang-Undang 18 tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Secara umum sampah merupakan hasil atau residu dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia terdiri dari sampah organik, sampah non organik, sampah B3 (Bahan berbahaya dan beracun). Pada dasarnya, kehidupan manusia tidak akan terlepas dari adanya sampah, mulai dari kantong plastik, bungkus makanan dan minuman, sisa makanan, food loss, dan pakaian bekas, semuanya itu adalah bentuk-bentuk sampah yang dihasilkan oleh manusia. Dikaitkan dengan kehidupan modern,

adanya pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat, maka akan bertambah pula volume, jenis, dan karakteristik sampah yang beragam.

Menurut Kepala Urusan Perencanaan Kecamatan Kiaracondong, Bapak Haryanto, jarak Tempat Pemrosesan Akhir dari Kecamatan Kiaracondong sangat jauh sehingga pemerintah desa berusaha mencari ide agar pengelolaan sampah dapat dilakukan. Ketika pemerintah desa melihat fenomena yang ada di masyarakat yaitu adanya penumpukan sampah di tepi jalan maka yang pemerintah desa memikirkan bahwa hal yang perlu dilakukan masyarakat untuk mengelola adalah dengan membayar iuran sampah tiap bulan sebagai biaya ongkos truk dan upah yang akan dibayarkan kepada pihak yang bertugas mengangkut sampah dari Kecamatan Kiaracondong ke tempat pembuangan sampah. Selain itu, tindakan yang dibutuhkan untuk mengurangi bobot sampah yang akan diangkut yaitu melalui pemilahan sampah organik dan sampah anorganik. Namun, hanya sedikit masyarakat yang mau membayar iuran sampah dan melakukan pemilahan sampah. Banyak masyarakat yang memilih untuk membuang sampah di kebun, membakar, atau mengubur di dalam tanah. Bahkan ada pula masyarakat yang tidak membayar iuran sampah, diam-diam membuang sampah di tempat yang disediakan untuk pengangkutan oleh petugas. Rendahnya kesadaran masyarakat Kecamatan Kiaracondong mengenai sampah dan pengelolaannya menyebabkan permasalahan sampah ini berpotensi memunculkan permasalahan sosial di kemudian hari. Oleh karena itu, praktikan mencari solusi untuk penanganan yang tepat dalam menghadapi hal tersebut.

2.4.2 Tinjauan konsep dan teori

a. Konsep tentang penataan lingkungan

Menurut Rohe (2009), Penataan lingkungan didefinisikan sebagai suatu kegiatan mendesain lingkungan baru atau mendesain pembangunan kembali (revitalisasi) lingkungan yang lama. Sedangkan menurut Checkoway (1985) penataan lingkungan didefinisikan tidak hanya berupa pengembangan fisik tetapi juga pengembangan layanan sosial pada tingkat lingkungan. Penataan lingkungan juga merupakan suatu proses masyarakat mengembangkan rencana, program, atau layanan sosial pada tingkat lingkungan ketetanggan (*neighborhood*).

Penataan lingkungan bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah besar yang dihadapi suatu kota, salah satunya adalah masalah kriminalitas (Rohe, 2009). Pada tingkat yang paling mendasar, penataan lingkungan melibatkan publik, organisasi non profit, dan usaha-usaha pihak swasta dalam perencanaaan yang fokus pada karakter fisik satu atau lebih lingkungan, namun itu didefinisikan pada tingkat lokal (Rohe, 2009).

Pengertian lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari ekologi, ekosistem dan daya dukung lingkungan. Istilah ekologi pertama kali digunakan oleh Haeckel di tahun 1860-an. Menurut Soemarwoto (1994: 22), bahwa istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eikos yang berarti rumah dan logos

berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah ekologi berarti tentang mahluk hidup dalam rumahnya atau dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang rumah tangga mahluk hidup.

b. Komponen Penataan Lingkungan Sosial

Terkait dengan kesinambungan lingkungan sosial maka setidaknya terdapat empat komponen lingkungan sosial yang perlu diperhatikan (Purba, 2002: 21-27). Keempat komponen tersebut ialah:

a) Pengelompokan sosial

Pengelompokan sosial ialah berbagai macam orang yang membentuk persekutuan atau pengelompokan sosial yang dilandasi hubungan kekerabatan (genealogical based relationship), seperti keluarga inti atau batih, marga atau klen, suku bangsa dan lain-lain.

b) Penataan sosial

Penataan sosial sangat diperlukan untuk mengatur ketertiban hidup dalam masyarakat yang mempersatukan lebih dari satu orang. Penataan itu dapat berupa aturan-aturan sebagai pedoman bersama dalam menggalang kerja sama dan pergaulan sehari-hari antar anggotanya. Setiap orang harus jelas kedudukannya dan peran peran yang harus dilakukan, dan mengetahui apa yang harus diberikan dan apa yang dapat diharapkan dari pihak lainnya.

c) Pranata sosial

Pranata sosial kebanyakan pranata sosial dikembangkan atas dasar kepentingan penguasaan lingkungan permukiman yang amat penting artinya bagi kelangsungan hidup masyarakat yang bersangkutan. Berbagai peraturan dikembangkan untuk menyisihkan orang-orang yang bukan anggota kesatuan sosial yang bersangkutan. Mereka tidak mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas penguasaan sumber daya alam yang tersedia seperti anggotanya.

d) Kebutuhan sosial

Lingkungan sosial itu terbentuk didorong oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana diketahui, bahwa tidak semua kebutuhan hidup manusia itu bisa terpenuhi oleh seorang diri, terutama kebutuhan sosial (social needs). Karena itu pemenuhan kebutuhan hidup yang mendasar (basic needs) senantiasa menimbulkan kebutuhan sampingan (*drived needs*).

c. Pengelolaan Sampah Organik

Sampah organik merupakan jenis sampah yang cukup mudah diolah. Sampah organik dapat diolah menjadi berbagai produk yang fungsional dan memiliki nilai ekonomis. Adapun cara mengolah sampah organik sebagai berikut.

a) Pupuk Kompos

Pupuk kompos adalah jenis pupuk organik yang berasal dari penguraian sampah organik seperti daun kering. Pembuatan kompos ini bisa dilakukan

secara alami. Namun saat ada tindakan dari manusia seperti penambahan mikroorganisme pengurai, pengomposan terjadi lebih cepat. Cara membuat kompos sangat mudah dan kandungan haranya juga cukup lengkap sehingga sangat berguna untuk budidaya tanaman.

b) Budidaya BSF (*Black Soldier Fly*) atau lalat tentara hitam

BSF (Hermetia Illucens) adalah sejenis lalat berwarna hitam yang larvanya (maggot) mampu mendegradasi sampah organik. Maggot atau belatung yang dihasilkan dari telur lalat hitam (BSF) sangat aktif memakan sampah organik. Proses biokonversi oleh maggot ini dapat mendegradasi sampah lebih cepat, tidak berbau, dan menghasilkan kompos organik, serta larvanya dapat menjadi sumber protein yang baik untuk pakan unggas dan ikan. Proses biokonversi dinilai cukup aman bagi kesehatan manusia karena lalat ini bukan termasuk binatang vektor penyakit. Kemampuan BSF mengurai sampah organik tak perlu diragukan lagi. Maggot membutuhkan sampah organik untuk tumbuh selama 25 hari sampai siap dipanen. Maggot memiliki kemampuan mengurai sampah organik 2 sampai 5 kali bobot tubuhnya selama 24 jam. Satu kilogram maggot dapat menghabiskan 2 sampai 5 kilogram sampah organik per hari. Maggot yang sudah menjadi prepupa maupun bangkai lalat BSF masih bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena kaya protein. Kepompongnya juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, sehingga dalam proses budidayanya tidak menghasilkan sampah baru. Cara budidaya maggot juga terbilang mudah. Yang dibutuhkan yaitu kandang lalat BSF yang berfungsi sebagai tempat BSF kawin dan memproduksi telur hingga penetasan. Kandang ditutup kawat atau kasa dan diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Untuk tempat bertelur bagi lalat BSF betina, perlu disiapkan kardus, kayu, atau papan yang memiliki celah. Taruh telur di media penetasan berupa box atau wadah kecil. Telur akan menetas dalam 3-4 hari. Terakhir, siapkan rak atau biopond untuk tempat pembesaran maggot.

c) Pupuk Organik Cair (POC)

Selain diolah menjadi kompos dan biogas, sampah organik juga bisa diolah menjadi pupuk organik cair. Mengutip dari modul “Pembuatan Pupuk Padat dan Cair dari Sampah Organik”, berikut cara membuat pupuk organik cair. Bahan dan Alat Pembuatan POC

1) Drum 200 liter beserta tutupnya.
2) Stop kran diameter 1 – 1,5 inchi.
3) Sock berderat pipa pralon PVC, ukurannya disesuaikan dengan stop kran.
4) Sealent, seal karet ban dalam.
5) Plastik yang telah dilubangi sesuai dengan ukuran drum. Sampah organik seperti sisa sayur dan buah.
6) EM-4.

Cara Membuat POC

1) Pasang pelat plastik yang telah dilubangi ke dalam drum.
2) Pasang penahan dibawah pelat plastik untuk menahan sampah yang akan dijadikan pupuk organik cair.
3) Buat lubang di samping drum untuk tempat stop kran.d) Pasang stop kran di lubang tersebut lalu lapisi dengan karet seal pada bagian luar dan dalam.
4) Pada bagian dalam pasang sock pipa plastik dengan stop kran. Lalu kencangkan agar stop kran tidak bocor.
5) Setelah alat pembuatan selesai, lanjutkan dengan memasukan seluruh sampah organik yang sudah dicincang ke dalam wadah tersebut.
6) Masukkan juga EM-4 sebagai starter.
7) Tutup drum dengan rapat.
8) Setelah fermentasi selesai, tampung pupuk cair dalam wadah lalu lakukan aerasi agar aroma fermentasi hilang.
9) Terakhir, kemas POC dalam wadah tertutup lalu aplikasikan ke tanaman di Biopori

   Biopori biasa juga disebut dengan lubang resapan biopori merupakan lubang yang dibuat tegak lurus ke dalam tanah. Lubang ini memiliki diameter antara 10-30 cm dan tidak memiliki muka air tanah dangkal. Lubang tersebut kemudian diisi dengan sampah organik yang memiliki fungsi sebagai makanan makhluk hidup yang ada di tanah, seperti cacing dan akar tumbuhan. Pembuatan lubang resapan biopori dapat mengurangi sampah organik dari rumah kita ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Karena, ketika kita membuat lubang, salah satu proses yang harus dilakukan adalah memasukkan sampah organik. Selain mengurangi sampah organik yang akan dibuang ke TPA, pembuatan biopori juga akan membuat masyarakat biasa memilah antara sampah organik dan anorganik. Pembuatan biopori dapat dilakukan dengan cara berikut:

   Alat dan bahan:

   a) Bor tanah

   b) Pipa PVC dan penutup yang sudah dilubangi bagian sisi-sisinya

   c) Sampah organik

   d) Air

   Langkah-langkah membuat biopori:

   a) Sebelum mulai membuat biopori, terlebih dahulu tentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pembuatan.

   b) Setelah ditentukan tempatnya, siram tanah yang akan dijadikan sebagai tempat pembuatan biopori dengan air agar tanah menjadi lebih lunak dan mudah untuk dilubangi.

   c) Lubangi tanah dengan menggunakan bor tanah, usahakan buat yang tegak lurus.

   d) Buat lubang dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan diameter

10-30 cm.

e) Setelah itu, lapisi lubang menggunakan pipa PVC yang ukurannya sama dengan diameter lubang.

f) Kemudian, isi lubang dengan sampah organik seperti daun, rumput, kulit buah-buahan, dan sampah yang berasal dari tanaman lainnya.

g) Setelah itu tutup lubang menggunakan kawat besi, atau bisa juga memakai tutup pipa PVC yang sudah dilubangi terlebih dahulu.

Perawatan biopori dilakukan dengan cara mengisi lubang biopori dengan sampah organik secara bertahap setiap lima hari sekali sampai lubang terisi penuh dennga sampah. Lubang resapan biopori yang sudah terisi penuh dengan sampah dapat kita biarkan selama tiga bulan agar sampah tersebut nantinya menjadi kompos. Setelah tiga bulan, angkat kompos yang sudah jadi dari lubang biopori, dan lubang siap diisi kembali dengan sampah yang baru. Kompos pun siap digunakan untuk memupuk tanaman yang ada di halaman rumah.

2.4.3 Proses Asesmen

2.4.3.1 Teknik Asesmen

Teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan potensi sumber adalah:

1.) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang ada di Kelurahan Babakan Surabaya mengenai sampah organik, wawancara berlangsung dilakukan bersama Bapak Haryanto, dan juga apabila praktikan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai apa saja permasalahan yang mereka alami. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data dan informasi dari narasumber.

2.4.3.2 Tahapan Asesmen

Kegiatan asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, potensi dan sumber daya terkait isu masalah analis penataan lingkungan yang ada di kelurahan Babakan Surabaya dilakukan dengan tahapan.

Mengidentifikasi permasalahan yang ada di kelurahan Babakan Surabaya khususnya di RW 12 terkait sampah organik, apa penyebab dan dampak mereka menggunakan sampah organik yang terbuang sia-sia yang ada nilai dan potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan.

Proses asesmen berlangsung dilakukan di Kelurahan Babakan Surabaya RW 12 melalui wawancara langsung. Karena masih ada warga yang menggunakan sampah organik terbuang sia-sia. Asesmen pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara langsung di kantor Kelurahan Babakan Surabaya untuk mengetahui kondisi dan permasalahan dan

wawancara dilakukan upaya memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai apa saja permasalahan yang dialami.

2.4.4 Hasil Asesmen

2.4.4.1 Identifikasi Masalah

Upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mengelola sampah sudah ada, yaitu melalui petugas yang mengangkut sampah dari desa menuju TPA. Untuk memudahkan proses pengangkutan dilakukan kegiatan pemilahan sampah yang digagas oleh penggiat lingkungan yaitu Ibu Emi selaku penggiat lingkungan di Kecamatan Kiaracondong Kegiatan pemilahan sampah dilakukan agar mengurangi tumpukan sampah, memudahkan daur ulang, mencegah polusi udara. Namun, nyatanya hanya sedikit masyarakat yang mau membayar iuran sampah dan melakukan pemilahan sampah. Banyak masyarakat yang memilih untuk membuang sampah di kebun, membakar, atau mengubur di dalam tanah. Bahkan ada pula masyarakat yang tidak membayar iuran sampah, diam-diam membuang sampah di tempat yang disediakan untuk pengangkutan oleh petugas. Rendahnya kesadaran masyarakat Kecamatan Kiaracondong mengenai sampah dan pengelolaannya menyebabkan permasalahan sampah ini berpotensi memunculkan permasalahan sosial di kemudian hari.

2.4.4.2 Analisis Pohon Masalah

Pohon masalah merupakan sebuah pendekatan/metode yang digunakan untuk identifikasi penyebab suatu masalah. Analisis pohon masalah dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih terstruktur mengenai komponen sebab akibat yang berkaitan dengan masalah yang telah diprioritaskan. Metode ini dapat diterapkan apabila sudah dilakukan identifikasi dan penentuan prioritas masalah.

Gambar 2.4 Analisis pohon masalah penataan lingkungan sosial

1) Penyebab Masalah

Dari hasil Analisis pohon masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa penyebab permasalahan, yaitu:

a) Jarak Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang terlalu jauh.
   Jauhnya jarak yang ditempuh oleh petugas kebersihan untuk mengangkut sampah dari Kecamatan Kiaracondong menuju TPA membutuhkan biaya yang banyak khususnya sopir yang mengendarai kendaraan dan bahan bakar minyak yang digunakan truk pengangkut.

b) Tingginya harga lahan untuk membangun Bank Sampah ataupun Tempat Penampungan Sementara (TPS). Kecamatan Kiaracondong memiliki lahan yang luas untuk digunakan mendirikan bangunan, namun harga yang terlalu tinggi menyebabkan pemerintah Desa tidak dapat membangun Bank Sampah ataupun TPS, sedangkan dana yang dimiliki Pemerintah Kecamatan Kiaracondong terbatas.

c) Kebiasaan masyarakat membakar, mengubur, dan membuang sampah di sungai.

Kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kiaracondong karena dinilai lebih praktis daripada membayar iuran dan mengumpulkan sampah di satu tempat yang telah ditentukan.

d) Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah organik.
   Masyarakat Kecamatan Kiaracondong banyak yang tidak mengetahui berbagai dampak buruk yang ditimbulkan dari penumpukan sampah organik yang tidak dikelola dengan baik. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat tidak aware terhadap aktivitas-aktivitas yang menghasilkan sampah.

2) Dampak Masalah

Untuk suatu penyebab akan ada dampak yang ditimbulkan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari beberapa penyebab di atas yaitu, diantaranya:

a) Penumpukan sampah di pinggir jalan yang menganggu pejalan kaki dan aktivitas masyarakat.
   Pengelolaan sampah yang tidak baik menciptakan tumpukan sampah di beberapa titik. Hal itu menimbulkan aroma yang tidak sedap dan pemandangan yang tidak indah dipandang.

b) Timbulnya sarang penyakit
   Tumpukan sampah organik yang tidak terurai akan menjadi tempat perkembangbiakan lalat. Seringkali di tumpukan sampah ditemukan belatung (proses metamorfosis dari telur lalat yang telah menetas). Hewan ini akan terus berkembang biak dan membawa virus dan bakteri ke manusia dengan hinggap di makanan.

c) Tercemarnya ekosistem
   Dengan kebiasaan masyarakat membakar, mengubur, dan membuang

sampah mengakibatkan polusi tanah, udara, serta menurunkan kualitas air di dalam tanah.

d) Sampah organik terbuang sia-sia

Akibat dari tidak adanya pengelolaan sampah organik di Kecamatan Kiaraondong, maka limbah yang seharusnya memiliki nilai atau potensi untuk dibuat sebagai produk organik terbuang sia-sia tanpa ada pemanfaatan.

3) Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus permasalahan adalah berkaitan dengan penataan lingkungan yaitu terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengolah sampah organik.

2.4.4.3 Identifikasi Kebutuhan

Kebutuhan masyarakat di Kecamatan Kiaracondong sebagai berikut:

1) Pelatihan pengelolaan sampah organik.

Masyarakat Kecamatan Kiaracondong membutuhkan pelatihan pengelolaan sampah organik sehingga dapat memilah dan memanfaatkan sampah organik menjadi suatu produk.

2) Sarana Pengelolaan sampah dalam bentuk tempat penampungan sementara.

Adanya tempat penampungan sementara dimaksudkan untuk mendorong masyarakat untuk mengumpulkan sampah di satu titik yang telah ditentukan sehingga tidak menciptakan tumpukan sampah yang tidak diinginkan.

3) Pengaktifan kembali bank sampah

Pengaktifan kembali bank sampah yang sebelumnya pernah ada bertujuan untuk memotivasi masyarakat untuk memilah dan menjual sampah yang dimiliki yang kemudian mendapatkan hasil dari penjualan sampah.

2.4.4.4 Identifikasi Potensi dan Sumber

Sistem sumber dalam kesejahteraan sosial dalam praktek pekerjaan sosial asset yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Alan Pincus dan Minahan (1973:4) membagi ruang lingkup sistem sumber kesejahteeraan sosial menjadi tiga:

1) **Sumber informal**

Sumber informal dapat berupa keluarga, teman, tetangga, orang lain yang bersedia membantu, dukungan emosional, kasih sayang, informasi, dan pelayanan konkrit lainnya. Sistem sumber informal yang dapat dimanfaatkan yaitu pihak pemerintah dan pegiat lingkungan.

2) **Sumber formal**

Sumber formal merupakan suatu organisasi atau asosiasi formal yang bertujuan untuk meningkatkan minat anggota mereka. Sumber formal yang

dapat dimanfaatkan yaitu pihak pemerintah dan anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). yang berperan sebagai fasilitator dan edukator bagi masyarakat.

3) **Sistem sumber kemasyarakatan**
   Sistem sumber ini berupa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat sebagai educator dan Pemerintah Kecamatan Kiaracondong sebagai fasilitator dalam pengelolaan sampah organik.

2.4.5 Rencana Intervensi

2.4.5.1 Nama Program

"Pelatihan pengolahan sampah organik di Kelurahan Babakan Surabaya"

2.4.5.2 Tujuan umum dan khusus

Tujuan Umum

Tujuan umum dari Program PESANGON Kiaracondong: Pelatihan Pengolahan Sampah Organik di Desa Kiaracondong adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam upaya mengurangi permasalahan sampah organik di Kecamatan Kiaracondong Kelurahan Babakan Surabaya.

Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari Program PESANGON Kiaracondong: Pelatihan Pengolahan Sampah Organik di Kecamatan Kiaracondong yaitu:

1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai pengolahan sampah organik.
2) Menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman

2.4.5.3 Bentuk Kegiatan dan Program

Program yang diusulkan oleh praktikan yaitu PESANGON Kiaracondong: Pelatihan Pengolahan Sampah Organik di Kecamatan Kiaracondong Adapun beberapa kegiatannya sebagai berikut:

1) Pelatihan budidaya maggot BSF

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat mengenai pengolahan sampah organic yang berasal dari rumah tangga melalui budidaya maggot BSF dan praktik pembuatan kandang maggot yang dicontohkan oleh pembudidaya maggot. Diharapkan peserta yang merupakan perwakilan dari tiap RW mampu menjadi pelopor di RW masing-masing.

2) Pelatihan pembuatan biopori

Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh peserta pelatihan dengan bimbingan oleh narasumber. Setiap peserta diharapkan mampu menjadi fasilitator di RW masing-masing.

2.4.5.4 Sistem Partisipan

Tabel 2.7 Sistem Partisipan: "Pelatihan Pengolahan Sampah Organik di Kecamatan Kiaracondong.

No	Sistem	Partisipan
1.	*Inisiator System*	Pihak pemerintah
2.	*Change Agent System*	Pihak pemerintah, pemerintah kecamatan kiaracondong, pegiat lingkungan
3.	*Client System*	Masyarakat kecamatan kiaracondong
4.	*Controling System*	Dinas lingkungan hidup kabupaten bandung
5.	*Target System*	Masyarakat Kecamatan Kiaracondong
6.	*Action System*	Masyarakat kecamatan kiaracondong, pembudidaya maggot BSF, pemerintah Kecamatan Kiaracondong, dan dinas Lingkungan kabupaten bandung.
7.	*Support System*	Anggota pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)
8.	*Implementing System*	Masyarakat Kecamatan Kiaracondong, pembudidaya maggot BSF, pemerintah Kecamatan Kiaracondong, dan dinas Lingkungan kabupaten Bandung.

2.4.5.5 Metode dan Teknik

Metode yang akan digunakan dalam melaksanakan Program yaitu dengan menggunakan Community Organization/Community Development (CO/CD). Community Organization yaitu suatu proses intervensi yang dilakukan dalam rangka menolong individu, kelompok, dan masyarakat untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui usaha bersama yang terencana. Metode ini digunakan untuk mambantu masyarakat di Kecamatan Kiaracondong meningkatkan kesadaran dalam pengolahan sampah organik di lingkungan tempat tinggalnya. Teknik yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program yaitu dengan teknik capacity building. Capacity building merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan, Brown (2001:25). Capacity building dilakukan melalui kegiatan pelatihan budidaya maggot BSF kepada masyarakat Kecamatan Kiaracondong.

2.4.5.6 Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

Setiap program pasti membutuhkan anggaran. Anggaran merupakan faktor penting dalam proses pelaksanaan program. Keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.8 Rencana Anggaran Biaya "Pengolahan Sampah Organik di Kecamatan Kiaracondong.

Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (RP)	Jumlah (RP)
Logistik				
ATK	1	Paket	25.000	25.000
Sound system	2	Unit	180.000	360.000
Mesin Pencacah Sampah	1	Unit	7.500.000	7.500.000
Prototype kendang maggot BSF	1	Paket	500.000	250.000
Bibit maggot BSF	1	Kilogram	100.000	100.000
Bior tanah biopori	1	Unit	95.000	95.000
Pipa PVC	1	Meter	50.000	50.000
Jumlah 1				8.380.000
Honorarium				
Pembudidaya maggot BSF	1	Orang/jam	400.000	400.000
Jumlah 2				400.000
Konsumsi				
Snack Peserta	25	Box	5.000	125.000
Snack panitia	2	Box	10.000	20.000
Jumlah 3				145.000
Jumlah keseluruhan				8.925.000

2.4.5.7 Analisis Kelayakan Program

Sebuah program kegiatan agar dapat dilaksanakan memerlukan suatu analisis kelayakan. Berdasarkan hal ini, praktikan menggunakan analisis SWOT yang merupakan analisis manajemen mengenai kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat) yang akan dihadapi dalam melaksanakan program atau kegiatan. Adapun analisis SWOT dalam program ini akan disajikan dalam gambar berikut ini:

Matrix 2.4 Analisis SWOT Program "Pengolahan Sampah Organik Kecamatan Kiaracondong.

SWOT	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	Adanya dukungan dari pemetintah desa berupa pendampingan oleh perwakilan pihak desa dalam program pelatihan pengelolaan sampah. Program komprehensif melalui pelatihan pengolahan sampah organik yang dilakukan orang yang ahli di bidangnya. Adanya skil yang diterima masyarakat setelah mengikuti pelatihan.	Masyarakat yang kesulitan dalam pelaksanaan praktik pelatihan
PELUANG (OPPORTUNITTY)	SO	WO
Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengolahan sampah yang baik program sesuai	Dengan melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah setempat dan instansi terkait	Pendampingan oleh anggota PKK dalam pelaksanaan praktik pelatihan.
TANTANGAN (THREAT)	ST	WS
Kemungkinan peserta tidak datang mengikuti kegiatan karena tidak tertarik dengan kegiatan	Menyebarkan pamflet berisi manfaat yang didapatkan apabila memiliki sistem pengelolaan sampah yang optimal	Melakukan evaluasi untuk perbaikan di program selanjutnya.

a. Jadwal dan Langkah-langkah

Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal pelaksanaan program dengan tujuan memperoleh hasil yang maksimal. Tahapan ini dilakukan sebelum pelaksanaan inti program yang dilakukan melalui tahap berikut:

1) Tahap koodinasi

Pada kegiatan koordinasi ini pihak pemerintah melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Desa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, dan PKK Kecamatan Kiaracondong Kelurahan Babakan Surabaya.

2) Pembentukan kepanitiaan

Tahap ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan dapat terkoordinasi dan terorganisir dengan baik. Kepanitiaan dibentuk berdasarkan hasil diskusi pihak yang terlibat dalam kegiatan. Kepanitiaan yang terbentuk hasil kesepakatan bersama sehingga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

3) Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan dilakukan oleh penyelenggara kegiatan meliputi alat, sarana dan prasarana. Identifikasi ini memudahkan panitia dalam mempersiapkan kegiatan.

4) Penentuan peserta

Peserta pada program ini adalah 5 orang perwakilan warga dari tiap RW di Kecamatan Kiaracondong.

5) Menentukan jadwal pelaksanaan

Panitia yang telah terbentuk membuat perencanaan program dengan menentukan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan pertama adalah pemaparan materi mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan dengan estimasi waktu 60 menit. Kemudian, setelah kegiatan presentasi dilanjutkan dengan praktik bagi masyarakat dengan estimasi waktu 120 menit.

6) Penyusunan rencana anggaran

Untuk melakukan suatu program maka panitia pelaksana membutuhkan biaya. Rencana anggaran dibuat sesuai dengan seluruh tahapan program. Sumber dana berasal dari dana swadaya yang dikumpulkan oleh setiap RW di Kecamatan Kiaracondong dan dana Pemerintah Kecamatan Kiaracondong.

7) Menentukan lokasi kegiatan

Panitia pelaksana melaksanakan tugas untuk mempersiapkan tempat yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan. Tempat tersebut harus mudah dijangkau oleh peserta. Lokasi kegiatan dilakukan di balai warga RW 05 Kecamatan Kiaracondong.

Tahap Pelaksanaan

Pelatihan Materi pada kegiatan sosialisasi adalah konsep sampah, teknik pemilahan, dan pemanfaatan sampah melalui budidaya maggot BSF dan pembuatan biopori yang akan disampaikan oleh narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dan pembudidaya maggot BSF. Setelah dilakukan pemaparan materi oleh narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan praktik pembuatan kandang budidaya maggot BSF di lahan yang sudah ditentukan oleh warga dan pembuatan biopori di salah satu rumah warga setempat.

Tahap Pengakhiran

Tahap pengakhiran dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan. Kegiatan pengakhiran terdiri atas:

1) Evaluasi kegiatan

Evaluasi merupakan kegiatan penting dalam menilai tingkat keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan. Pada kegiatan ini, pelaksana program dan

panitia melakukan kegiatan evaluasi terhadap proses untuk melihat tingkat kesuksesan proses pada setiap tahapan. Panitia akan membahas hambatan atau kendala yang dialami pada saat pelaksanaan kegiatan dalam program Pengelolaan Sampah Kecamatan Kiaracondong.

2) Penyusunan laporan

Kegiatan pelaporan merupakan tahapan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Seluruh panitia akan menyusun suatu laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban.

2.5 Profil Analis Penanggulangan Bencana

2.5.1 Gambaran Umum Masalah

Dilansir dari cnnindonesia.com, gempa di Indonesia sebagian juga disebabkan oleh sesar (patahan) yang aktif. Sesar ini menjadi pemicu guncangan atau gempa bumi bila bergerak cepat dan melepas energi. Sesar merupakan patahan lapisan penyusun bumi yang mengalami pergerakan. Sesar punya dua sisi, namun yang biasanya bergerak biasa disebut sebagai hanging wall atau dinding menggantung. Sesar diklasifikasikan menjadi empat jenis berdasarkan arah peregerakan batuan terhadap bidang sesar dan gaya yang menjadi penyebab sesar. Pertama, yakni Normal Faults (sesar normal) yang terjadi akibat gaya tekan maksimum pada arah vertikal sehingga menyebabkan salah satu bidang batuan bergerak ke bawah mengikuti bidang sesar. Kedua, yaitu Reverse Faults (sesar naik) karena gaya maksimum yang bekerja pada batuan berarah horizontal. Batuan yang ditekan oleh gaya tersebut menyebabkan salah satu bagian batuan bergerak ke atas. Reverse Faults biasa terjadi pada area di mana dua lempeng tektonik bertabrakan. Ketiga, Sesar mendatar.

Selain bergerak ke arah vertikal (atas/bawah), bidang batuan juga dapat bergerak dengan arah horizontal akibat Gaya yang bekerja pada batuan tersebut (Strike-slip Faults/sesar mendatar). Hal tersebut terjadi akibat gaya maksimum dan gaya minimum memiliki arah horizontal. Keempat, sesar miring atau Oblique Faults. Patahan ini bergerak di sepanjang arah dip dan juga bergerak horizontal. Getaran dirasakan oleh penduduk sekitar. Beberapa hari kemudian, hujan mengguyur wilayah tersebut sehingga mengakibatkan terhambatnya pendistribusian bantuan kepada yang terdampak gempa. Hal ini menyebabkan banyaknya korban jiwa, korban luka-luka, fasilitas publik, dan fasilitas umum. Masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan akan banjir dan longsor susulan karena kontur tanah yang rawan. Bencana yang terjadi tanpa adanya kesiapsiagaan memberikan dampak buruk bagi masyarakat di Kecamatan Kiaracondong Kelurahan Babakan Surabaya dan di sekitarnya.

2.5.2 Tinjauan konsep dan teori

2.5.2.1 Konsep tentang bencana

Definisi Bencana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

2.5.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Bencana

Menurut Nurjanah: 2012 terdapat 3 faktor penyebab terjadinya bencana, yakni:

1) Faktor alam (natural disaster) karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan manusia.
2) Faktor non-alam (non-natural disaster) yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia.
3) Faktor sosial/manusia (man-made disaster) yang murni akibat perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme.

   Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena adanya interaksi antara ancaman (hazard) dan kerentanan (vulnerability). Ancaman bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Kerentanan terhadap dampak atau risiko bencana adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakatv untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu.

2.5.2.3 Peran pekerja sosial dalam Praktik Penanggulangan Bencana

Menurut Tukino (2013), Peranan Pekerja Sosial dibedakan berdasarkan 3 tahap yaitu pada saat pra bencana, saat terjadinya bencana dan pasca bencana. Pada tahap prabencana pekerja sosial berperan sangat penting dalam pengurangan risiko bencana, terutama dalam hal :

1) Peningkatan kesadaran masyarakat dan pemberian informasi mengenai kerawanan, bahaya dan risiko bencana.

   Pada situasi tidak terdapat bencana, kegiatan pendidikan dan pelatihan mengenai risiko bencana pada tataran masyarakat sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengatasi

risiko bencana yang mungkin terjadi. dengan berbagai pendekatan dan teknik yang dimiliki, pihak pemerintah dapat melakukan perubahan sikap dan perilaku masyarakat agar mereka memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana sehingga dapat mengurangkan risiko kehilangan nyawa dan harta benda yang dimiliki.

2) Pemetaan kapasitas masyarakat dalam pencegahan bencana dan pengurangan risiko bencana.

   Pemetaan ini amat penting untuk menunjukan pola umum risiko yang mengancam masyarakat dan kapasitas mereka menghadapi risiko yang mungkin terjadi. Pemetaan ini juga penting untuk membantu dalam merencanakan persiapan yang dapat mengurangi bahaya dalam masyarakat dan dalam mengidentifikasi rencana evakuasi bagi daerah yang berisiko.

3) Bersama masyarakat membangun sistem penanggulangan bencana yang berkelanjutan pada tingkat lokal.

   Pembentukan kelembagaan penanggulangan bencana yang berfungsi menjalankan sistem pencegahan dan mitigasi, kedaruratan, dan pemulihan.

4) Pihak pemerintah juga dapat melakukan advokasi kepada parapihak, yang bertujuan agar terjadi perubahan pada tataran kebijakan dan perencanaan dalam penanggulangan bencana.

5) Pada saat pasca bencana Pihak pemerintah berperan penting dalam membantu korban bencana/pengungsi, terutama dalam hal:

   a) Pembentukan atau pengembangan forum warga/keluarga pengungsi korban bencana alam. Forum ini dimaksudkan untuk meningkatkan integrasi, solidaritas, dan toleransi sosial antar korban bencana maupun masyarakat lokal.

   b) Pelatihan-pelatihan penanganan masalah. Merupakan program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para korban bencana di daerah pasca bencana dalam mengatasi masalah atau dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

   c) Pelatihan keterampilan usaha, pemberian bantuan modal usaha, dan pendampingan dalam pengembangan usaha.

2.5.3 Proses Asesmen

5.3.1 Teknik Asesmen

Teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan potensi sumber adalah:

1.) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang ada di kelurahan Babakan Surabaya mengenai bencana gempa bumi serta warga yang tempat tinggalnya rusak karena terkena gempa, wawancara berlangsung dilakukan bersama Pak Bambang, dan juga apabila praktikan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik wawancara ini digunakan

dengan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai apa saja permasalahan yang mereka alami. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data dan informasi dari narasumber.

2.5.3.2 Tahapan Asesmen

Kegiatan asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, potensi dan sumber daya terkait isu masalah Analis penanggulangan bencana yang ada di kelurahan Babakan Surabaya dilakukan dengan tahapan.

Mengidentifikasi permasalahan yang ada di kelurahan Babakan Surabaya di Kecamatan Kiaracondong berisiko gempa karena faktor sosial, apa penyebab dan dampak serta apa kebutuhan dan potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan, berdasarkan informasi dari pak Bambang ada beberapa rumah yang rusak karena terkena gempa.

Proses asesmen berlangsung dilakukan di kantor Kelurahan Babakan Surabaya melalui wawancara langsung. Karena terdapat masyarakat yang berisiko bencana gempa dikarenakan faktor sosial, asesmen pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara langsung dikantor Kelurahan Babakan Surabaya untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang ada dan wawancara dilakukan upaya memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai apa saja permasalahan yang mereka alami.

2.5.4 Hasil Asesmen

2.5.4.1 Identifikasi Masalah

Kejadian bencana gempa bumi berkekuatan 6,1 SR yang disusul dengan longsor dan hujan angin yang terjadi pada 25 Februari 2022 di Kecamatan Kiaracondong menyebabkan kerugian berupa korban jiwa, harta benda, maupun kerusakan parah pada fasilitas umum dan sarana prasarana. Gempa yang episenternya berjarak 12 kilometer Timur Laut wilayah Kecamatan Kiaracondong dengan kedalaman 10 kilometer ini tidak menunjukkan adanya potensi tsunami akibat guncangan gempa bumi. Pak Bambang mengatakan bahwa gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa kerak dangkal akibat aktivitas sesar akitf. Adapun korban dalam bencana gempa bumi tersebut yaitu sebanyak 27 jiwa meninggal dunia, dan juga luka-luka.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dan masyarakat di sekitarnya harus memahami potensi risiko tersebut. Banyaknya korban jiwa dan rumah-rumah warga yang hancur menunjukkan bahwa system mitigasi atas risiko itu belum berjalan baik dan perlu dievaluasi. Selain itu pa Bambang mengatakan bahwa minimnya pemahaman masyarakat akan risiko gempa dan longsor telah membuktikan bahwa sistem mitigasi gempa darat. Sebenarnya, kajian dan penelitian mengenai ancaman potensi gempa telah diketahui dan dipahami.

2.5.4.2 Analisis Pohon Masalah

Pohon masalah merupakan sebuah pendekatan/metode yang digunakan untuk identifikasi penyebab suatu masalah. Analisis pohon masalah dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih terstruktur mengenai komponen sebab akibat yang berkaitan dengan masalah yang telah diprioritaskan. Metode ini dapat diterapkan apabila sudah dilakukan identifikasi dan penentuan prioritas masalah.

Gambar 2.4 Analisis Pohon Masalah Penanggulangan Bencana

1) Penyebab Masalah

Dari hasil Analisis pohon masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa penyebab permasalahan, yaitu:

a) Minimnya pemahaman masyarakat akan risiko terjadinya gempa bumi. Ketidaktahuan masyarakat akan bahaya dan ancaman yang mengintai di wilayah tempat mereka tinggal menyebabkan tidak adanya kesiapsiagaan dari masyarakat.

b) Kurangnya pemetaan kawasan rawan bencana oleh pihak terkait. Tidak adanya pemetaan kawasan rawan bencana oleh BPBD menyebabkan masyarakat tidak mengetahui wilayah yang memiliki kerentanan terhadap bencana dan jalur evakuasi jika terjadi bencana.

c) Tidak adanya peringatan dini akan terjadi gempa bumi
Di Kecamatan Kiaracondong belum ada lembaga yang memberikan informasi mitigasi bencana secara detail sebagai upaya menyiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Dan tidak adanya alat peringatan dini untuk menyebabkan masyarakat tidak mengetahui akan terjadi gempa bumi.

2) Dampak Masalah

Untuk suatu penyebab akan ada dampak yang ditimbulkan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari beberapa penyebab di atas yaitu diantaranya:

a) Masyarakat tidak mempunyai persiapan dalam menghadapi bencana gempa bumi.

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai risiko gempa bumi mengakibatkan masyarakat tidak adanya kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan terjadi. Masyarakat juga tidak dapat memperkirakan kapan akan terjadi gempa bumi sehingga mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi.

b) Masyarakat mengalami kerentanan terhadap bencana

Ketidaktahuan masyarakat mengenai peta kawasan rawan bencana di wilayahnya mengakibatkan masyarakat Kecamatan Kiaracondong yang tidak memiliki kemampuan manajemen risiko akan memiliki kerentanan yang tinggi. Masyarakat akan mengalami kerentanan yang tinggi ketika tidak mengetahui jalur evakuasi yang harus dilalui apabila terjadi bencana.

c) Banyaknya korban jiwa, luka-luka, kehilangan harta benda, rusaknya sarana prasarana dan fasilitas umum.

Rendahnya manajemen risiko menyebabkan dampak negatif. Kejadian bencana gempa bumi yang disusul dengan longsor dan hujan angin yang terjadi tepatnya pada 25 Februari 2022 tersebut menyebabkan 27 jiwa meninggal dunia, dan luka-luka. Selain banyaknya jumlah korban jiwa dan luka-luka, bencana tersebut juga menyebabkan kerusakan rumah.

3) Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus permasalahan adalah masyarakat Kecamatan Kiaracondong terkait dengan rendahnya Kemampuan Manajemen Risiko Bencana gempa bumi Masyarakat di Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Babakan Surabaya.

2.5.4.3 Identifikasi Kebutuhan

Kebutuhan masyarakat di Kecamatan Kiaracondng sebagai berikut:

1. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana di Kecamatan Kiaracondong.

   Masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai mitigasi bencana merupakan masyarakat tangguh bencana.

2. Meningkatkan kemampuan masyarakat Kecamatan Kiaracondong dalam mitigasi bencana.

   Peningkatan kemampuan masyarakat dalam mitigasi bencana akan

mengurangi risiko bencana yang akan terjadi di masa yang akan datang.

3. Pembuatan dan penyediaan peta kawasan rawan gempa bumi
   Pembuatan dan penyediaan kawasan rawan gempa bumi diperlukan agar masyarakat tidak membangun pemukiman di daerah rawan bencana.

2.5.4.4 Identifikasi Potensi dan Sumber

Sistem sumber dalam kesejahteraan sosial dalam praktek pekerjaan sosial asset yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Alan Pincus dan Minahan (1973:4) membagi ruang lingkup sistem sumber kesejahteeraan sosial menjadi tiga:

1. **Sumber informal**
   Sumber informal dapat berupa keluarga, teman, tetangga, orang lain yang bersedia membantu, dukungan emosional, kasih sayang, informasi, dan pelayanan konkrit lainnya. Sistem sumber informal yang dapat dimanfaatkan yaitu pihak pemerintah dan tokoh masyarakat.
2. **Sumber formal**
   Sumber formal merupakan suatu organisasi atau asosiasi formal yang bertujuan untuk meningkatkan minat anggota mereka Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
3. **Sistem sumber kemasyarakatan**
   Sistem sumber ini berupa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

2.5.5 Rencana Intervensi

2.5.5.1 Nama Program

"Peningkatan kemampuan manajemen risiko masyarakat di Kecamatan Kiaracondong".

2.5.5.2 Tujuan umum dan khusus

Tujuan Umum

Tujuan umum dari Program PEKA MARIMAS: Peningkatan Kemampuan Manajemen Risiko Masyarakat di Kecamatan Kiaracondong Kelurahan Babakan Surabaya adalah untuk meningkatkan kemampuan manajemen risiko masyarakat yang rawan bencana di Kecamatan Kiaracondong.

Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari Program PEKA MARIMAS: Peningkatan Kemampuan Manajemen Risiko Masyarakat di Kecamatan Kiaracondong yaitu:
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Mitigasi Bencana.
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang daerah rawan gempa bumi. Agar masyarakat mengetahui jalur evakuasi saat terjadi bencana.

2.5.5.3 Bentuk Kegiatan dan Program

Dalam program “PEKA MARIMAS: Peningkatan Kemampuan Manajemen Risiko Masyarakat di Kecamatan Kiaracondong” ini, kegiatan yang

akan dilakukan yaitu sosialisasi mengenai bencana khususnya bencana gempa bumi dan tanah longsor. Sosialisasi mengenai bencana gempa bumi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Materi pada kegiatan sosialisasi adalah konsep mengenai bencana, mitigasi bencana, pemetaan wilayah rawan bencana, serta pemberitahuan mengenai jalur evakuasi. Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bencana gempa bumi dan tanah longsor.

2.5.5.4 Sistem Partisipan

Tabel 2.9 Sistem Partisipan "Program PEKA MARIMAS: Peningkatan Kemampuan Manajemen Risiko Masyarakat Di Kecamatan Kiaracondong.

No.	System	Partisipan
1.	*Inisiator System*	Pihak pemerintah
2.	*Change Agent System*	Pihak pemerintah
3.	*Client System*	Masyarakat Kecamatan Kiaracondong
4.	*Controling System*	Pihak pemerintah Pemerintah Kecamatan Kiaracondong
5.	*Target System*	Masyarakat Kecamatan Kiaraconong
6.	*Action System*	Pihak pemerintah Dinas sosial BPBD Kecamatan Kiaracondong BMKG
7.	*Support System*	Pemerintah Kecamatan Kiaracondong BPBD Kecamatan Kiaracondong Tokoh masyarakat Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
8.	*Implementing System*	BPBD Kecamatan Kiaracondong dan BMKG

2.5.5.5 Metode dan Teknik

Metode yang akan digunakan dalam melaksanakan Program yaitu dengan menggunakan *Community Organization/Community Development* (CO/CD). *Community Organization* yaitu suatu proses intervensi yang dilakukan dalam rangka menolong individu, kelompok, dan masyarakat untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui usaha bersama yang terencana.. Metode ini digunakan untuk mambantu masyarakat di Kecamatan Kiaracondong meningkatkan kesadaran dalam mitigasi bencana terhadap ancaman bencana yang ada di daerah tersebut.

Teknik yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program yaitu Penyuluhan sosial. Menurut Permensos No 10 tahun 2014, Penyuluhan sosial adalah sebuah proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial, baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran,

sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna partisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam program ini, penyuluhan dilakukan bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman mengenai mitigasi bencana dan jalur evakuasi.

2.5.5.6 Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dubutuhkan

Setiap program pasti membutuhkan anggaran. Anggaran merupakan faktor penting dalam proses pelaksanaan program. Keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.10 Rencana Anggaran Biaya "Program PEKA MARIMAS: Peningkatan Kemampuan Manajemen Risiko Masyarakat di Kecamatan Kiaracondong.

Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (RP)	Jumlah (RP)
Logistik				
ATK	1	Paket	25.000	25.000
Sound System	2	Unit	180.000	360.000
Banner Kegiatan	2×4	Meter	25.000	25.000
Proyektor	1	Unit	150.000	150.000
Layar Proyektor	1	Unit	50.000	50.000
Jumlah 1				610.000
Honorarium				
Kepala BPDB Kecamatan Kiaracondong	1	Orang/jam	400.000	400.000
TAGANA Kecamatan Kiaracondong	1	Orang/jam	400.000	400.000
Jumlah 2				800.000
Konsumsi				
Snack Peserta	25	Box	5.000	125.000
Snack Panitia	2	Box	10.000	20.000
Snack Narasumber	2	Box	20.000	40.000
Jumalah 3				185.000
Jumlah keseluruhan				1.595.000

2.5.5.7 Analisis Kelayakan Program

Sebuah program kegiatan agar dapat dilaksanakan memerlukan suatu analisis kelayakan. Berdasarkan hal ini, praktikan menggunakan analisis SWOT yang merupakan analisis manajemen mengenai kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat) yang akan dihadapi

dalam melaksanakan program atau kegiatan. Adapun analisis SWOT dalam program ini akan disajikan dalam gambar berikut ini.

Matrix 2.5 Analisis SWOT program "PEKA MARIMAS. Peningkatan Kemampuan Manajemen Risiko Masyarakat di Kecamatan Kiaracondong.

SWOT	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	Melibatkan stakeholder BPBD, Dinas Sosial dan BMKG untuk memberikan materi dan pendampingan dalam pelaksanaan program Pelatihan dilakukan oleh ahli	Anggaran biaya yang besar
PELUANG (OPPORTUNITY)	SO	WO
Adanya dukungan dari stakeholder Program yang sesuai dengan program dari stakeholder	Melakukan kerjasama dengan para stakeholder terkait untuk meningkatkan manfaat program Merencanakan program bersama dengan ahli dan stakeholder	Menyusun proposal program dan diajukan
TANTANGAN (THREAT)	ST	WT
Jumlah sistem sasaran yang besar	Membentuk kelompok sadar bencana	Menyusun proposal program dan diajukan kepada stakeholder sehingga kegiatan yang berjenjang dan anggaran yang besar dapat terlaksana.

2.5.5.8 Jadwal dan Langkah-langkah

Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal pelaksanaan program dengan tujuan memperoleh hasil yang maksimal. Tahapan ini dilakukan sebelum pelaksanaan inti program yang dilakukan melalui tahap berikut:

1) Tahap koodinasi

Pada kegiatan koordinasi ini pihak pemerintah melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan Kiaracondng, BPBD Kecamatan Kiaracondong, BMKG dan Dinas sosial.

2) Pembentukan kepanitiaan

Tahap ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan dapat terkoordinasi dan terorganisir dengan baik. Kepanitiaan dibentuk berdasarkan hasil diskusi pihak yang terlibat dalam kegiatan. Kepanitiaan yang terbentuk hasil kesepakatan bersama sehingga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

3) Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan dilakukan oleh penyelenggara kegiatan meliputi alat,

sarana dan prasarana. Identifikasi ini memudahkan panitia dalam mempersiapkan kegiatan.

4) Penentuan peserta

Peserta pada program ini adalah 5 orang perwakilan warga dari tiap kecamatan.

5) Menentukan jadwal pelaksanaan

Panitia yang telah terbentuk membuat perencanaan program dengan menentukan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan pertama adalah pemaparan materi mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan dengan estimasi waktu 120 menit

6) Penyusunan rencana anggaran

Untuk melakukan suatu program maka panitia pelaksana membutuhkan biaya. Rencana anggaran dibuat sesuai dengan seluruh tahapan program.

7) Menentukan lokasi kegiatan

Panitia pelaksana melaksanakan tugas untuk mempersiapkan tempat yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan. Tempat tersebut harus mudah dijangkau oleh peserta. Lokasi kegiatan dilakukan di Gedung pertemuan Pemerintah Kelurahan Babakan Surabaya.

Tahap Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi mengenai bencana gempa bumi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Materi pada kegiatan sosialisasi adalah konsep mengenai bencana, mitigasi bencana, pemetaan wilayah rawan bencana, serta pemberitahuan mengenai jalur evakuasi. Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bencana gempa bumi dan tanah longsor.

Tahap Pengakhiran

Tahap pengakhiran dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan. Kegiatan pengakhiran terdiri atas:

Evaluasi kegiatan

Evaluasi merupakan kegiatan penting dalam menilai tingkat keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan. Pada kegiatan ini, pelaksana program dan panitia melakukan kegiatan evaluasi terhadap proses untuk melihat tingkat kesuksesan proses pada setiap tahapan. Panitia akan membahas hambatan atau kendala yang dialami pada saat pelaksanaan kegiatan dalam program PEKA MARIMAS: Peningkatan Kemampuan Manajemen Risiko Masyarakat di Kecamatan Kiaracondong.

Penyusunan laporan

Kegiatan pelaporan merupakan tahapan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Seluruh panitia akan menyusun suatu laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban.

BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan

Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial dilaksanakan dengan tujuan sebagai salah satu upaya untuk membentuk mahasiswa agar sesuai dengan profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial dilakukan secara dalam jaringan (luring). Praktikan diminta untuk menganalisis isu terkait profil lulusan dengan menggunakan data sekunder. Berikut hasil analisis praktikan terhadap profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial:

1. Analis Jaminan sosial, praktikan mengambil isu mengenai penonaktifan Kartu Indonesia Sehat tidak maksimal. Permasalahan ini disebabkan karena Nomor Induk Keluarga (NIK) peserta yang tidak valid dan penolakan data masyarakat pada sistem. Permasalahan ini menyebabkan implementasi program Kartu Indonesia Sehat tidak maksimal dapat dilihat dari masyarakat tidak dapat berobat dengan menggunakan Kartu Indonesia Sehat. Dalam upaya pemecahan permasalahan ini, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui Program Sosialisasi BPJS JKN-KIS Kecamatan Kiaracondong. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep BPJS Kesehatan dan prosedur pengecekan status kepesertaan agar dapat memperoleh hak sebagai Penerima Bantuan Iuran JKN-KIS.
2. Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, praktikan mengambil isu mengenai bantuan UMKM tidak tepat sasaran yang ada di wilayahnya. Permasalahan ini disebabkan karena masyarakat yang banyak mengambil data atau keterangan lain dan mengambil foto tidak sesuai sasaran. Oleh karena itu dalam upaya pemecahan masalah, praktikan mengusulkan untuk mengadakan sosialisasi mengenai konsep. tujuan, fungsi dan manfaat Usaha Mikro Kecil Menengah masyarakat.
3. Analis Pemberdayaan Sosial, praktikan mengambil isu pelaksanaan posyandu lansia yang tidak berjalan efektif, kurangnya dukungan pemerintah desa, hanya ada satu bidan desa, serta jarak yang ditempuh menuju posyandu cukup jauh. Hal ini mengakibatkan keterbatasan informasi yang diterima lansia dan keluarga mengenai penyakit yang dialami, minimnya kegiatan pada Bina Keluarga Lansia, ketiadaan pengecekan rutin kesehatan lansia, dan pendanaan untuk pelaksanaan posyandu yang terbatas. Oleh karena itu, dalam upaya pemecahan masalah praktikan mengusulkan program pelaksanaan Advokasi dan Forum Diskusi Posyandu Flamboyan 1 yang diharapkan mendapatkan hasil yang baik sehingga ada peningkatan pelayanan Posyandu Lansia.

4. Analis Penataan Lingkungan Sosial, praktikan menemukan isu di Kecamatan Kiaracondong mengenai terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengolah sampah organik. Hal ini disebabkan karena kebiasaan masyarakat untuk membakar, mengubur, dan membuang sampah di sungai, tingginya harga lahan yang akan dipakai untuk TPS/Bank Sampah, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah, serta faktor jarak lokasi TPA yang cukup jauh. Adapun akibat yang ditimbulkan dari hal yang disebutkan di atas yaitu penumpukan sampah di pinggir jalan, timbulnya bau tidak sedap di sekitar pemukima, dan sampah organik yang terbuang sia-sia. Upaya pemecahan masalah yang dapat dilakukan yaitu melalui pelatihan maggot BSF dan pembuatan biopori yang bertujuan untuk mengurangi timbunan sampah organik dan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat yang mengelolanya.
5. Analis Penanggulangan Bencana, praktikan mengambil isu mengenai rendangnya kemampuan manajemen risiko masyarakat di Kecamatan Kiaracondong. Permasalahan ini disebabkan karena minimnya pemahaman masyarakat akan risiko terjadinya gempa bumi, kurangnya pemetaan kawasan rawan bencana oleh pihak terkait, tidak adanya sosialisasi mengenai mitigasi bencana, dan tidak adanya peringatan dini akan terjadi gempa bumi. Dampak yang ditimbulkan yaitu banyaknya jumlah korban jiwa dan luka-luka, kehilangan harta benda, rusaknya sarana prasarana fasilitas umum, dan masyarakat mengalami kerentanan. Dalam upaya pemecahan permasalahan ini, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui program PEKA MARIMAS: Peningkatan Kemampuan Manajemen Risiko Masyarakat di Kecamatan Kiaracondong yang bertujuan untuk meningaktkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana.

3.2 Rekomendasi

1. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

Praktikan memberikan beberapa saran dalam pelaksanaan Praktikum Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, diantaranya:

Untuk program studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

1) Diharapkan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial mempersiapkan pedoman yang tetap sehingga tidak ada perbedaan dalam penulisan laporan akhir praktikum laboratorium.
2) Menghadirkan narasumber yang expert di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial agar mengetahui prospek kerja yang dimiliki Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.

2. Politeknik Kesejahteraan Sosial

Untuk Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung diharapkan adanya penyediaan akses pada jurnal-jurnal gratis mengenai Pekerjaan Sosial untuk memudahkan pelaksanaan praktikum laboratorium.

DAFTAR PUSTAKA

Khoirunisa, Rizqia (2019). Kartu BPJS nonaktif karena data Ganda (Double Data) begini cara mengatasinya. http://www.pasienbpjs.com/2019/06/mengatasi-bpjsnonaktif-kepesertaan-ganda.html diakses 17 Februari 2023.

Deepublish. https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-edukasi-adalah/ diakses 17 Februari 2023.

https://fasicha.com/2020/09/22/sbm-2021-11-honorarium-narasumber-moderatorpembawa-acara-panitia/ diakses 19 Februari 2023.

http://mulyabachteraarrayyan.blogspot.com/2013/10/pohon-masalah-teknik-riset.html.

http://yurikamaha.blogspot.com/2016/05/sistem-sumber-menurut-allen-pincusand.html.

Website resmi desa gayam. (2021). Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) & Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) https://gayambjn.desa.id/artikel/2021/3/28/pkk-posyandu.

Jabarprov. (2020). Tingkatkan Kebahagiaan Para Lansia, TP PKK Jabar Perkuat Program BKL https://jabarprov.go.id/index.php/news/39926/2020/11/02/TingkatkanKebahagiaan-Para-Lansia-TP-PKK-Jabar-Perkuat-Program-BKL.

Antara news. (2022). Sampah yang tak tertangani di Kabupaten Bandung capai 968 ton per hari. https://www.antaranews.com/berita/2664521/sampah-yang-tak-tertangani-dikabupaten-bandung-capai-968-ton-per-hari.

Gischa, Serafica. (2022). Masalah Sosial di Lingkungan tempat Tinggal. https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/18/165321769/masalah-sosial-dilingkungan-tempat-tinggal?page=all

Sustaination. (2021). Bahaya Sampah Organik, Ancaman Besar Bagi Bumi Kita! https://sustaination.id/bahaya-sampah-organik/

DLH Probolinggo. (2021). Pengolahan Sampah Organik dengan Maggot di TPA Seboro. https://dlh.probolinggokab.go.id/pengolahan-sampah-organik-denganmaggot-di-tpa-seboro/

Balai Wilayah Sungai Sulawesi II.(2018). Cara Membuat Biopori untuk Resapan Air dan Mengatasi Banjir. https://sda.pu.go.id/balai/bwssulawesi2/cara-membuat-biopori/

Ikhsan, M. (2021). Mengenal Istilah Sesar-sesar Potensi Picu Gempa https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210128114150-199-599431/mengenalistilah-sesar-sesar-potensi-picu-gempa

Sumber lain:

Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial

Peraturan Menteri Sosial No 10 tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial

UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang RI nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan PKK

Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres 99 tahun 2017 tentang Gerakan PKK

Permenkes RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Dasar di Pos Pelayanan Terpadu

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah

Lampiran